



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Negara termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk melindungi masyarakat di Daerah dari potensi bahaya bencana baik alam maupun non alam;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu disusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
6. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
8. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.
9. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang menjadi acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Standar Operasional Prosedur adalah Serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
12. Penanganan Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat;
- b. dasar penyusunan Rencana Kontingensi bencana untuk masing-masing bencana prioritas; dan
- c. dasar penyusunan seluruh prosedur operasi tanggap darurat bagi institusi yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana.

Pasal 3

Tujuan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah untuk:

- a. menyiapkan mekanisme tanggap darurat bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menghadapi situasi kedaruratan bencana;
- b. menyiapkan pelaksanaan fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat bencana;
- c. menyiapkan mekanisme pembagian peran, tanggung jawab, dan pengerahan sumber daya semua pihak terkait dalam penanganan kedaruratan bencana;

- d. memberikan pedoman yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam perencanaan penanganan kedaruratan bencana; dan
- e. sebagai pedoman untuk menyusun rencana kontingensi.

Pasal 4

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Banyumas ini merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, baik karena perubahan situasi risiko bencana dan/atau karena alasan konfigurasi organisasi pemerintahan yang berubah cukup signifikan.

Pasal 6

- (1) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi dan standar operasional prosedur atau rencana operasi darurat bencana.
- (2) Rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar operasional prosedur atau rencana operasi darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA

STRUKTUR ISI DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS

I. OUTLINE STRUKTUR ISI DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA

Dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) merupakan dokumen kesiapsiagaan untuk mengantisipasi jika bencana benar-benar terjadi, sesuai lingkup wilayah pemerintahan masing-masing. RPKB adalah rencana yang lebih menitikberatkan pada suatu kerangka kerja bagaimana pemerintah menanggapi darurat bencana secara taktis, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. RPKB memuat resume kajian risiko bencana, bencana prioritas, skenario kejadian, dampak, kebijakan dan strategi, mekanisme, pos komando dan kendali,

Berikut Outline Struktur isi dokumen Rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB)

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

BAB I SITUASI

- 1.1 Profil Wilayah
- 1.2 Risiko Bencana Wilayah
- 1.3 Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana
- 1.4 Skenario kejadian dan Asumsi dampak

BAB II KEBIJAKAN dan STRATEGI

- 1.1 Kebijakan
- 1.2 Strategi

BAB III MEKANISME

- 3.1 Identifikasi Pemangku Pemerintahan
- 3.2 Konseps Operasi
- 3.3 Fungsi
- 3.4 Tugas-tugas
- 3.5 Instruksi Koordinasi

BAB IV KOMANDO, KENDALI, dan KOMUNIKASI

BAB V PENUTUP

II. PENULISAN DOKUMEN RENCANA RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RPKB)

BAB I SITUASI

1.1. Profil Wilayah

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah barat daya. Secara astronomis, Banyumas terletak antara 7°15'05" – 7°37'10" Lintang Selatan dan antara 108°39'17" – 109°27'15" Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara adalah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang;
 - Sebelah timur adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.
 - Sebelah selatan adalah Kabupaten Cilacap;
 - Dan Sebelah barat adalah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.
- (Sumber: Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018)

Gambar 1.1. Peta Kedudukan Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah



Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan. Kabupaten Banyumas memiliki total luas wilayah 132.759 hektar. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok yang meliputi 7,93% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 10.534 hektar, dan wilayah kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 740 hektar¹. Luas dan persentase luas wilayah kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Banyumas

¹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lumbir	10	-	10.266	7,73%
2	Wangon	12	-	6.078	4,58%
3	Jatilawang	11	-	4.816	3,63%
4	Rawalo	9	-	4.964	3,74%
5	Kebasen	12	-	5.400	4,07%
6	Kemranjen	15	-	6.071	4,57%
7	Sumpiuh	11	3	6.001	4,52%
8	Tambak	12	-	5.203	3,92%
9	Somagede	9	-	4.011	3,02%
10	Kalibagor	12	-	3.573	2,69%
11	Banyumas	12	-	3.809	2,87%
12	Patikraja	13	-	4.323	3,26%
13	Purwojati	10	-	3.786	2,85%
14	Ajibarang	15	-	6.650	5,01%
15	Gumelar	10	-	9.395	7,08%
16	Pekuncen	16	-	9.270	6,98%
17	Cilongok	20	-	10.534	7,93%
18	Karanglewas	13	-	3.250	2,45%
19	Kedungbanteng	14	-	6.022	4,54%
20	Baturraden	12	-	4.553	3,43%
21	Sumbang	19	-	5.342	4,02%
22	Kembaran	16	-	2.592	1,95%
23	Sokaraja	18	-	2.992	2,25%
24	Purwokerto Selatan	0	7	1.375	1,04%
25	Purwokerto Barat	0	7	740	0,56%
26	Purwokerto Timur	0	6	842	0,63%
27	Purwokerto Utara	0	7	901	0,68%
Jumlah		301	30	132.759	100%

(Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2023)

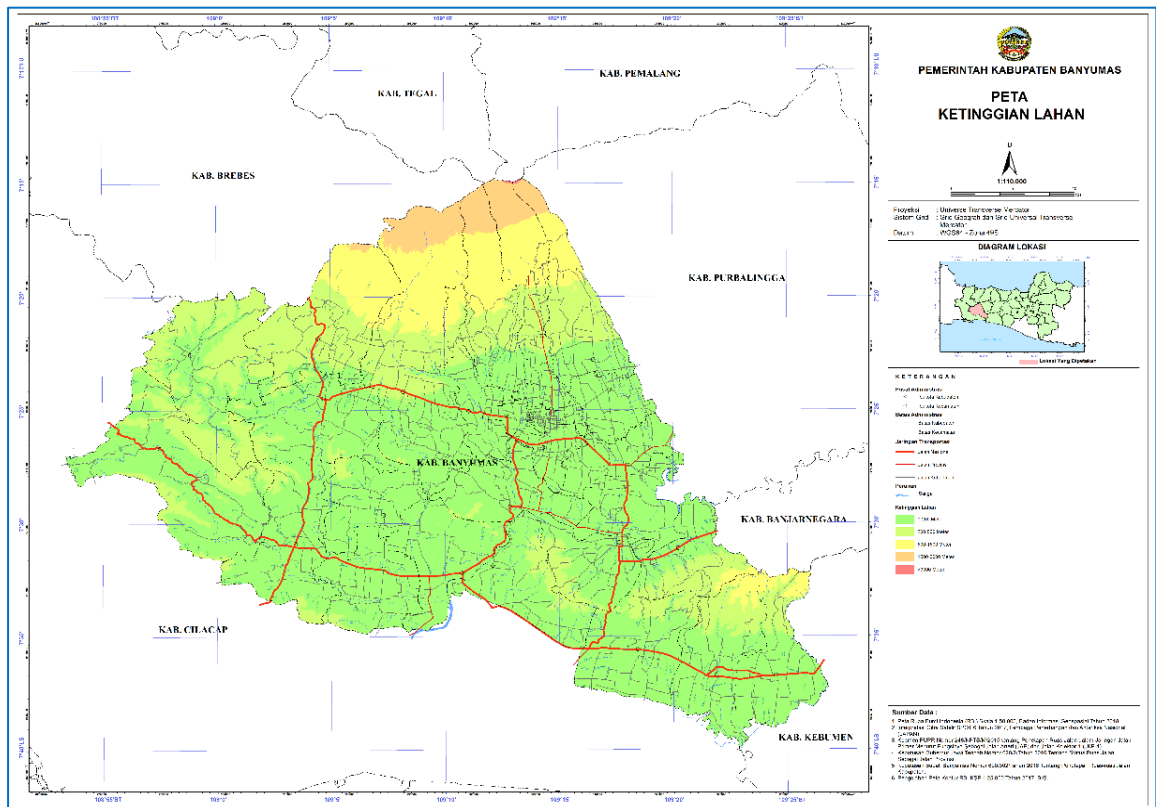
Wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada ketinggian 0-500 mdpl. Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan bentuk bentang alam dan penyebaran geografisnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: 1) pegunungan di sebelah utara (lereng Gunung Slamet) dan daerah pegunungan Serayu Selatan; 2) dataran rendah di antara lereng Gunung Slamet dan pegunungan Serayu Selatan; dan 3) dataran rendah di sebelah selatan pegunungan Serayu Selatan. Daerah dataran potensial sebagai kawasan budidaya, sedangkan daerah perbukitan dengan faktor pembatas kemiringan dan ketinggian lahan diarahkan untuk kawasan konservasi.

Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki topografi yang kompleks, kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan

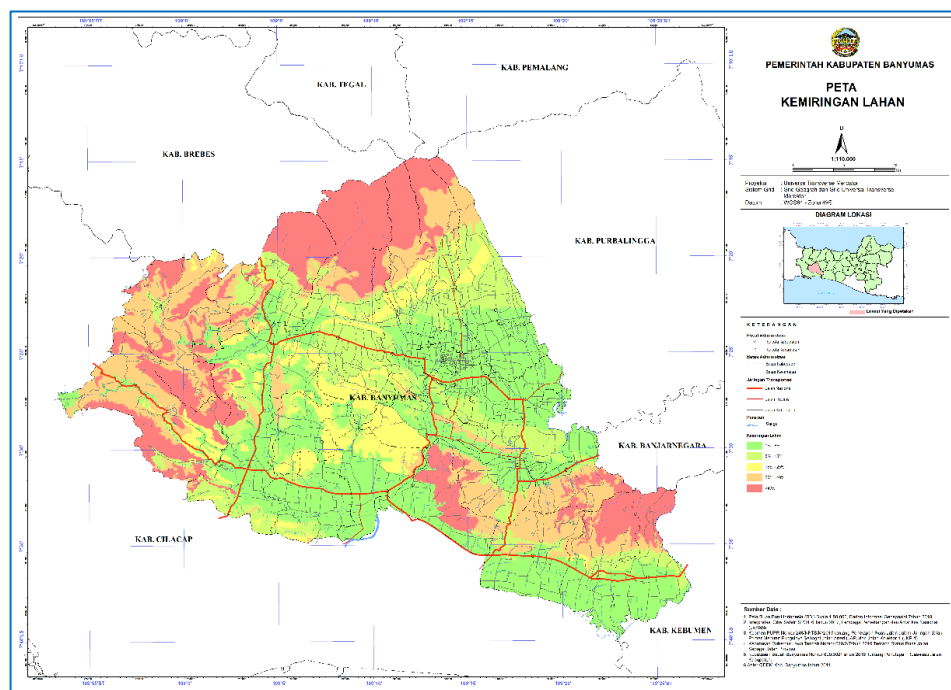
kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan pengukuran menggunakan data spasial peta ketinggian lahan dan peta kemiringan lahan didapatkan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketinggian lahannya wilayah Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Dataran dengan ketinggian 0 - 200 meter diatas permukaan laut (dpl) terdapat di sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyumas, yaitu meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
 - b. Dataran dengan ketinggian 200 - 500 meter diatas permukaan laut (dpl) terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
 - c. Dataran dengan ketinggian 500 – 1500 meter diatas permukaan laut (dpl) sebagian besar terdapat di wilayah bagian utara dan tenggara, yaitu meliputi Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak.
 - d. Dataran dengan ketinggian 1500 – 3000 meter diatas permukaan laut (dpl) terdapat di wilayah paling utara yaitu meliputi Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Pekuncen, dan Kecamatan Sumbang.
 - e. Dataran dengan ketinggian > 3000 meter diatas permukaan laut (dpl) terdapat di wilayah bagian paling utara yaitu meliputi Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang.
2. Sedangkan berdasarkan kemiringan lahannya wilayah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Wilayah datar dengan kemiringan 0% - 8% terdapat sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyumas, yaitu meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan

- Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
- b. Wilayah landai dengan kemiringan 8%-15% terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
- c. Wilayah agak curam dengan kemiringan 15%–25% terdapat di Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Wangon.
- d. Wilayah curam dengan kemiringan 25%-40% terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
- e. Wilayah sangat curam dengan kemiringan > 40% terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.



Gambar 2.1. Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Banyumas



(Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018)

Gambar 3.1. Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Banyumas

Banyaknya intensitas curah hujan sangat berpengaruh terhadap kesesuaian pemanfaatan lahan. Jumlah hari hujan pada Tahun 2021 di Kabupaten Banyumas terjadi secara fluktuatif yaitu 163 hari dengan curah hujan yang beragam perbulannya. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari yaitu sebanyak 572 mm³ dengan jumlah hari sebanyak 20 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 71 mm³ yang terjadi selama 7 hari, Angka ini menunjukkan bahwa curah di

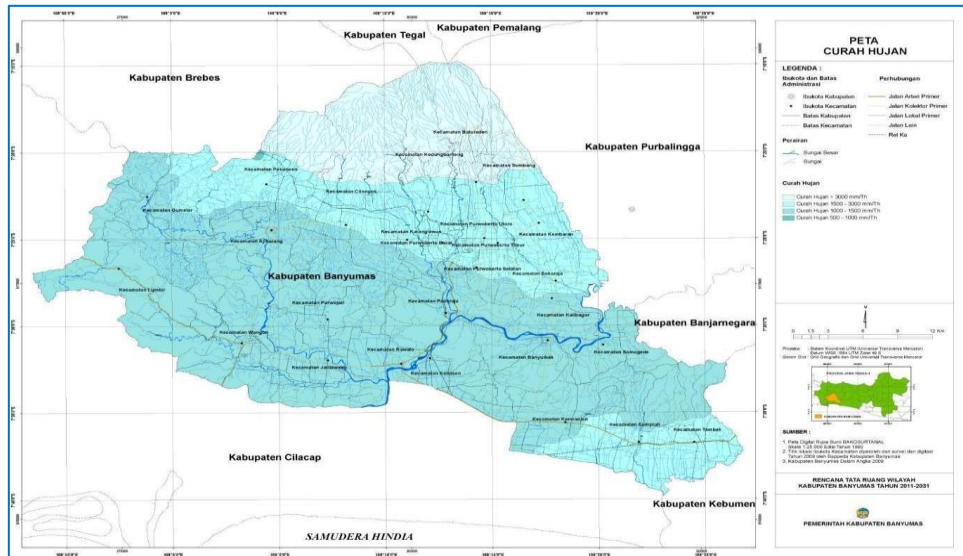
Kabupaten Banyumas cukup tinggi, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis di wilayah Banyumas yang terletak di lereng Gunung Slamet.

Tabel 2.1. Rata-rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	572	20
Februari	375	19
Maret	313	16
April	193	11
Mei	79	5
Juni	174	11
Juli	94	5
Agustus	71	7
September	227	14
Oktober	238	13
November	452	21
Desember	407	21
Jumlah	3.195	163

(Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2022)

Wilayah Kabupaten Banyumas terbagi menjadi empat berdasarkan curah hujan, yaitu wilayah dengan curah hujan 500-1000 mm/tahun, 1000-1500 mm/tahun, 1500-3000 mm/tahun, dan >3000 mm/tahun (Gambar 2.1). Sesuai dengan letak geografisnya, curah hujan tertinggi (>3000 mm/tahun) terletak di sebelah utara yang terletak di lereng Gunung Slamet seperti Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumbang, dan Kecamatan Pekuncen. Sedangkan curah hujan terendah (500-100 mm/tahun) terletak hanya sedikit di sebagian kecil Kecamatan Pekuncen. Curah hujan yang dominan ada di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 1500-3000 mm/tahun yang tersebar di bagian tengah sampai bagian selatan meliputi Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Somagede.



(Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018)
 Gambar 4.1. Peta Curah Hujan Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, Zona Serayu dan Pegunungan Serayu Selatan, Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan Pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari Barat Laut–Tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas, Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur yang disebut Zona Serayu, Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.

Secara struktur geologi, Kabupaten Banyumas terdiri atas formasi; 1) Aluvial, 2) Anggota Batugamping, 3) Anggota Batupasir, 4) Anggota Breksi, 5) Basal), 6) Bat. Gunungapi Slamet tidak terdiferensiasi, 7) Batuan Terobosan, 8) Endapan Lahar Gunung Slamet, 9) Endapan Undak, 10) Formasi Halang, 11) Formasi Kumbang, 12) Formasi Pasean, 13) Formasi Penosogan, 14) Formasi Rambatan, 15) Formasi Tapak, 16) Lava Gunung Slamet, 17) Produk batuan erupsi tua Slamet.

Dilihat dari jenis tanah yang ada di Kabupaten Banyumas, terdapat 9 jenis tanah yaitu sebagai berikut:

Alluvial, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Banyumas, Kalibagor, Patikraja, Rawalo, Sokaraja, Cilongok, Purwojati, dan Kecamatan Ajibarang.

Andosol, Penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Baturraden, dan Kecamatan Sumbang.

Asosiasi Andosol dan Regosol, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Cilongok.

Asosiasi Mediteran, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Pekuncen, Cilongok, Kedungbanteng, Karanglewas, dan Kecamatan Ajibarang.

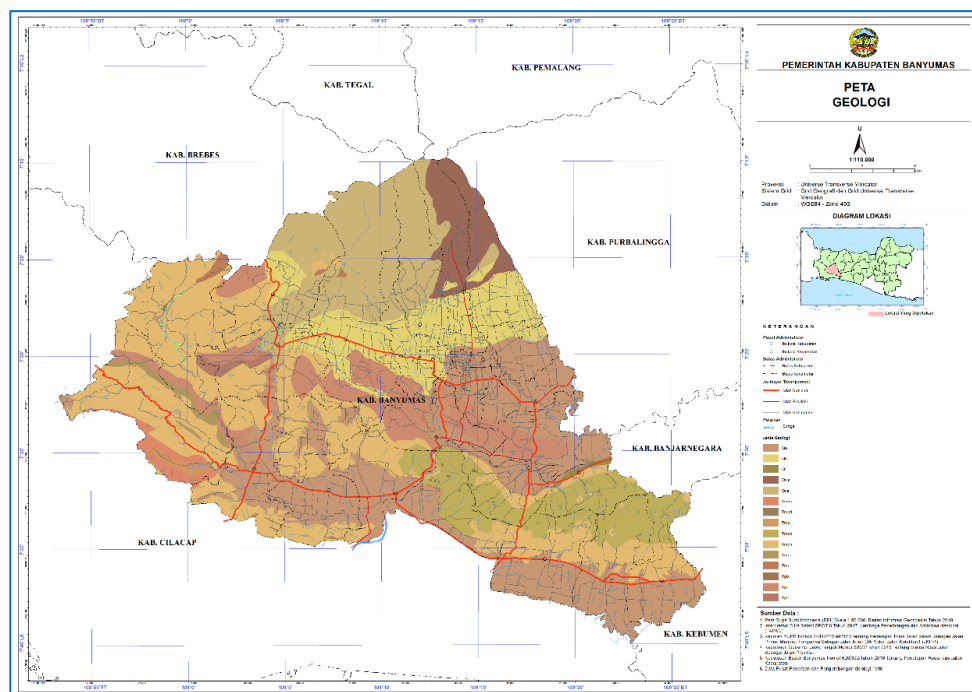
Glei Humus, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Kemranjen.

Grumosol Hitam, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Lumbir.

Kompleks Mediteran, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Ajibarang, Cilongok, Purwojati, Wangon, Jatilawang, Pekuncen, Gumelar, Kebasen, Banyumas, Rawalo, Baturraden, Sumbang, Kedungbanteng, Kembaran, Patikraja, Karanglewas, Sokaraja, dan wilayah Perkotaan Purwokerto.

Komplek Regosol dan Litosol, penyebarannya meliputi wilayah di Kecamatan Baturraden dan Cilongok.

Latosol, penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Lumbir, Gumelar, Wangon, Ajibarang, Pekuncen, Purwojati, Jatilawang, Cilongok, Karanglewas, Patikraja, Kalibagor, Banyumas, Kemranjen, Kebasen, Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak.



(Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018)

Gambar 5.1. Peta Geologi Kabupaten Banyumas

Kondisi hidrologi menggambarkan potensi sumber daya air yang meliputi distribusi, pergerakan, dan kualitas sumber daya air. Kondisi hidrologi dipengaruhi oleh struktur tanah, topografi, geologi, geomorfologi dan curah hujan. Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi air permukaan (sungai dan mata air) dan air tanah. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m³/hari atau 16.591.564.830 m³/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya. Sementara itu potensi air bawah tanah di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu:

Potensi air bawah tanah tinggi, berada pada kelulusan sedang pada batuan bersifat tufaan dan tinggi pada lava vesikuler dan breksi (vulkanik muda), Debit (Q) air bawah tanah bervariasi antara 800 sampai >1000 m³/hari/km, Debit (Q) mata air bisa mencapai > 300 liter/detik.

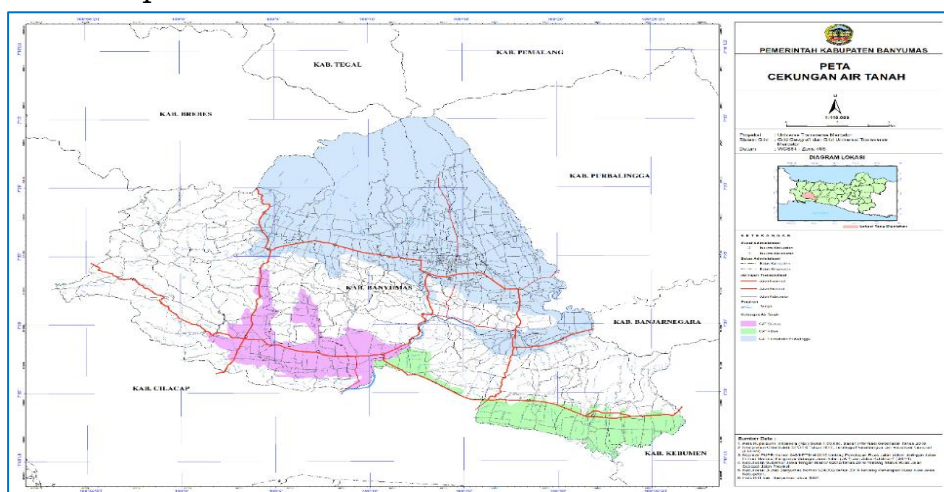
Potensi air bawah tanah tinggi sampai sedang, berada pada kelulusan sedang sampai tinggi, air tanah berada pada alluvium gunung api, debit (Q) mata air bisa mencapai 50 liter/detik.

Potensi air bawah tanah sedang, berada pada kelulusan sedang, meliputi: 1) air tanah pada struktur celah, saluran dan rekahan dalam batu gamping Formasi Tapak, debit (Q) mata air bisa < 10 liter/detik, dan 2) air tanah pada aluvium dataran dan sungai, debit (Q) air tanah sebesar 300 m³/hari/km, debit mata air bisa 10 - 50 liter/detik.

Potensi air bawah tanah rendah, berada pada kelulusan kecil sampai sangat kecil, air tanah berada pada aluvium endapan rawa (dataran pantai, hasil rombakan batuan tersier).

Potensi air bawah tanah langka, berada pada kelulusan sangat kecil sampai langka, air tanah berada pada lokasi puncak Gunung Api Slamet di batuan Lava dan puncak penyebaran endapan tersier hanya sebagai media aliran.

Kondisi hidrologi menyediakan potensi sumber daya air yang diperlukan oleh berbagai kegiatan manusia. Air tanah yang telah dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah Purwokerto–Purbalingga, Cekungan Air Tanah Kroya, dan Cekungan Air Tanah Cilacap.

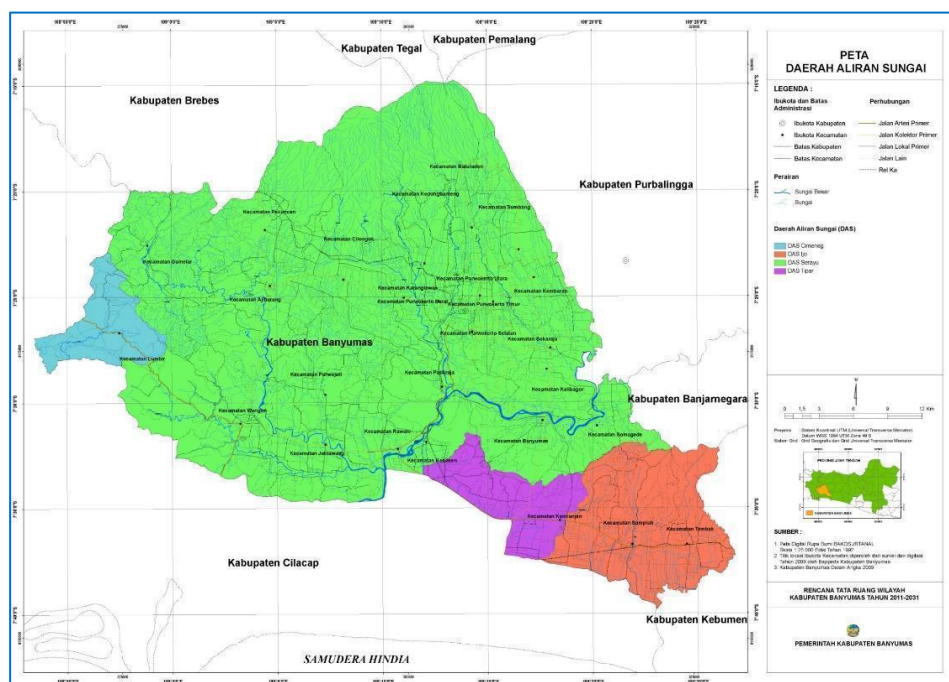


(Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018)

Gambar 6.1. Peta Cekungan Air Tanah

Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimeneng, Serayu, Ijo, dan Tipar. Keempat DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Di antara empat DAS tersebut, DAS Serayu merupakan DAS dengan luasan paling besar. Sebagai daerah tengah-hilir Sungai Serayu, aktivitas di hulu sungai di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara akan sangat berpengaruh pada kondisi sungai di Kabupaten Banyumas. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk sumber irigasi pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan. Namun demikian potensi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Banyumas tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki potensi air permukaan sedangkan potensi air tanah sulit untuk diperoleh.

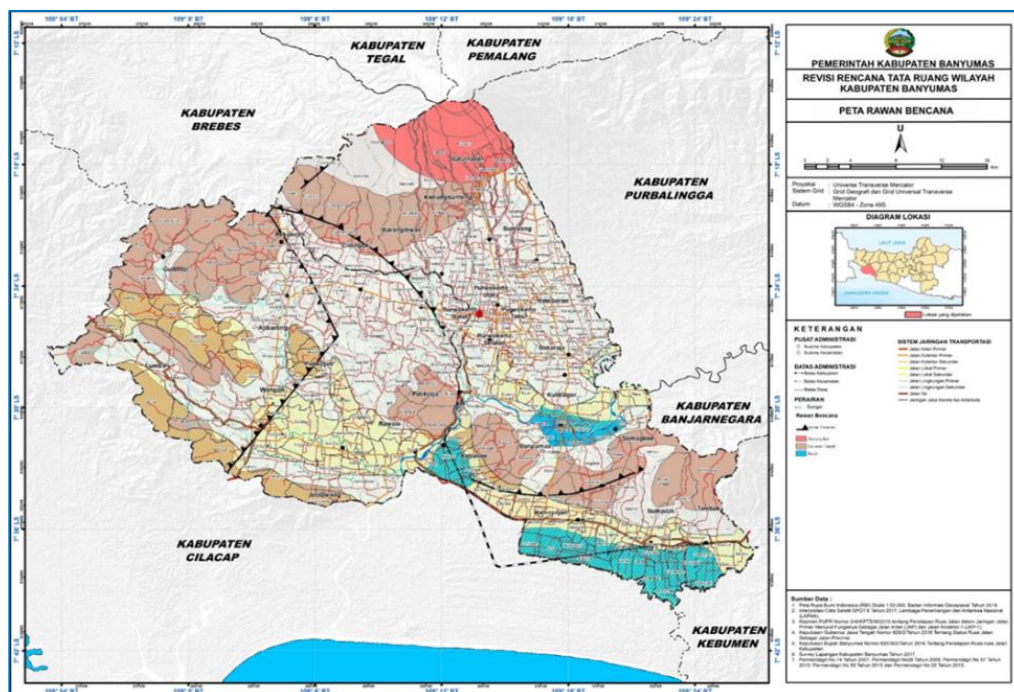
Selain permasalahan potensi, beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas memiliki permasalahan kualitas air untuk kebutuhan air minum.



(Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018)

Gambar 7.1. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Banyumas

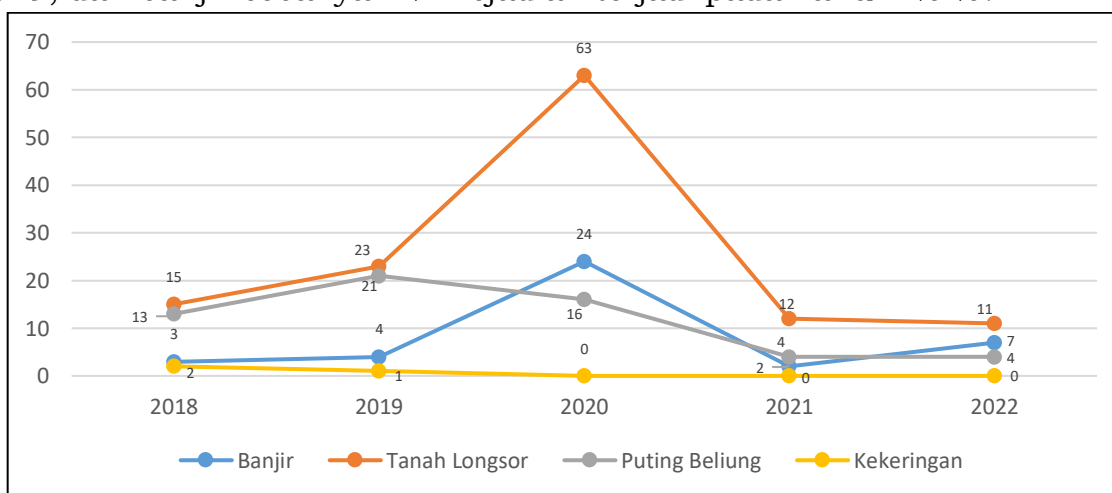
Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana gerakan tanah baik karena kemiringan lahan maupun dilalui sesar/patahan, rawan bencana banjir, kekeringan, dan rawan letusan gunung berapi. Wilayah rawan bencana gerakan tanah/Tanah Longsor merupakan jenis bencana yang terdapat di hampir seluruh kecamatan. Hal ini terkait dengan kondisi fisik sebagian wilayah Kabupaten Banyumas yang berada pada tingkat kelerengan tinggi, serta adanya sesar atau patahan yang juga mempengaruhi kerawanan bencana gerakan tanah. Terkait dengan bencana alam lainnya juga terdapat wilayah yang rawan terhadap letusan gunung api yang bersumber dari Gunung Slamet. Bencana alam lain di Kabupaten Banyumas adalah banjir dan kekeringan yang memiliki keterkaitan dengan iklim dan kondisi topografi Kabupaten Banyumas, yang masing-masing tersebar di 7 kecamatan dan 16 kecamatan. Wilayah yang tidak memiliki kerawanan bencana terdapat di 3 kecamatan berdasarkan pemetaan bencana yaitu Kecamatan Kembaran, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur.



(Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2018)

Gambar 8.1. Peta Rawan Bencana Kabupaten Banyumas

Berdasarkan analisis data dari Geoportal Data Bencana Indonesia, kejadian bencana di Kabupaten Banyumas selama 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2022 didominasi oleh kejadian bencana Tanah Longsor, puting beliung, dan banjir. Kejadian tertinggi untuk Bencana Tanah Longsor sebanyak 63 kejadian terjadi pada Tahun 2020, angin puting beliung sebanyak 21 kejadian terjadi pada Tahun 2019, dan banjir sebanyak 24 kejadian terjadi pada Tahun 2020.



(Sumber: BNPB, 2022)

Gambar 9.1. Grafik Kejadian Bencana Kabupaten Banyumas 2018 – 2022

1.2. Risiko Bencana Wilayah

Dari beberapa kondisi diatas (geografis, topografi, hidrologi, klimatologi, dan geologi), secara kajian risiko bencana mengkategorisasi beberapa ancaman bencana yang muncul di Kabupaten Banyumas sebagaimana berikut,

Tabel 3.1. Kelas Bahaya di Kabupaten Banyumas

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (HA)	KELAS
	CUACA EKSTRIM	88.444.71	TINGGI
	TANAH LONGSOR	70.095.33	TINGGI
	BANJIR	34.518.87	TINGGI
	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	13.281.84	TINGGI
	KEKERINGAN	139.142	TINGGI
	GEMPABUMI	139.142	SEDANG
	LETUSAN GUNUNGAPI SLAMET	5.904	SEDANG

(Sumber: Hasil Analisis KRB Tahun 2022, 2023)

Table 3.1. memperlihatkan kelas pada masing-masing bahaya bencana di wilayah Kabupaten Banyumas. Hasil pengkajian bahaya bencana di Kabupaten Banyumas didapatkan berdasarkan hitungan dan rekapitulasi hasil pengkajian per kecamatan.

1. Banjir

Banjir yang terjadi di Kabupaten Banyumas terjadi karena factor topografi Bencana banjir akibat pembudidayaan daerah dataran banjir, dan peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai, belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir, permukiman di bantaran sungai, sistem drainase yang tidak memadai, masih terbatasnya tindakan mitigasi banjir, kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang bantar dan wilayah alur sungai, penggundulan hutan di daerah hulu, terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir, dan elevasi tanah di wilayah rawan banjir belum memperhatikan persil bangunan tahan banjir.

Kejadian Bencana banjir terjadi di beberapa wilayah di Utara dan Banjir di wilayah Barat, berikut merupakan beberapa desa terdampak banjir pada tahun 2021, antara lain Desa Karangkemojing, Desa Karanglo, Desa Karanglewas Kidul, Desa Panusupan, Desa Kranji, Desa Grendeng, Desa Sokaraja Lor, Desa Kaliori, dan Desa Kanding.

Tabel 4.1.Potensi Luas Bahaya Banjir Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Banjir	398,61	195,75	703,08	1.297,44	Tinggi
Wangon	Banjir	890,64	480,60	1.086,39	2.457,63	Tinggi
Jatilawang	Banjir	1.062,54	652,14	1.161,18	2.875,86	Tinggi
Rawalo	Banjir	631,89	613,98	1.387,44	2.633,31	Tinggi

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Kebasen	Banjir	447,93	442,89	929,43	1.820,25	Tinggi
Kemranjen	Banjir	722,79	379,35	1.368,00	2.470,14	Tinggi
Sumpiuh	Banjir	527,76	284,58	1.323,99	2.136,33	Tinggi
Tambak	Banjir	459,54	356,04	1.273,59	2.089,17	Tinggi
Somagede	Banjir	328,77	488,16	471,06	1.287,99	Sedang
Kalibagor	Banjir	583,29	612,27	909,54	2.105,10	Tinggi
Banyumas	Banjir	315,18	292,41	586,71	1.194,30	Tinggi
Patikraja	Banjir	406,44	247,77	638,64	1.292,85	Tinggi
Purwojati	Banjir	410,94	190,26	646,29	1.247,49	Tinggi
Ajibarang	Banjir	451,80	193,59	378,36	1.023,75	Tinggi
Gumelar	Banjir	227,70	105,93	663,39	997,02	Tinggi
Pekuncen	Banjir	388,98	146,25	348,57	883,80	Tinggi
Cilongok	Banjir	403,29	138,06	632,97	1.174,32	Tinggi
Karanglewas	Banjir	356,22	126,54	206,37	689,13	Tinggi
Kedungbanteng	Banjir	154,62	157,77	54,99	367,38	Sedang
Baturraden	Banjir	70,83	125,37	17,46	213,66	Sedang
Sumbang	Banjir	87,75	256,59	188,91	533,25	Sedang
Kembaran	Banjir	204,75	471,87	259,56	936,18	Sedang
Sokaraja	Banjir	315,81	608,76	426,24	1.350,81	Sedang
Purwokerto Selatan	Banjir	195,12	69,21	160,38	424,71	Tinggi
Purwokerto Barat	Banjir	210,06	96,12	139,59	445,77	Tinggi
Purwokerto Timur	Banjir	54,81	233,73	77,58	366,12	Sedang
Purwokerto Utara	Banjir	115,92	40,41	48,78	205,11	Rendah
KABUPATEN BANYUMAS	Banjir	10.423,98	8.006,4	16.088,49	34.518,87	Tinggi

(Sumber: Hasil Analisis KRB Kab. Banyumas Tahun 2023)

Berdasarkan tabel 4.1. terlihat besaran luas bahaya dalam unit analisis kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian terutama topografi dan sungai. Bahaya banjir terletak pada daerah-daerah bertopografi datar dan dilalui oleh beberapa sungai besar. Rekapitulasi kajian bahaya per kecamatan menentukan total luas bahaya banjir untuk Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana banjir memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Banyumas dengan total 34.518,87 ha yang berada pada kategori Kelas Tinggi.

Tabel 5.1. Potensi Kerugian Bencana Banjir di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	LUAS	KELAS
1.	Lumbir	0,31	0,06	0,37	Sedang	2,01	Tinggi
2.	Wangon	73,87	5,06	78,92	Sedang	2,00	Tinggi
3.	Jatilawang	64,23	32,43	96,66	Tinggi	1,99	Tinggi
4.	Rawalo	56,76	63,26	120,03	Tinggi	2,00	Tinggi
5.	Kebasen	41,79	10,12	51,92	Tinggi	1,87	Tinggi
6.	Kemranjen	27,51	27,72	55,22	Tinggi	1,99	Tinggi
7.	Sumpiuh	68,85	27,80	96,66	Tinggi	1,97	Tinggi
8.	Tambak	30,09	9,68	39,76	Tinggi	2,00	Tinggi
9.	Somagede	18,07	-	18,07	Sedang	1,99	Tinggi
10.	Kalibagor	41,46	19,11	60,58	Tinggi	2,00	Tinggi
11.	Banyumas	63,21	0,32	63,51	Sedang	1,88	Tinggi
12.	Patikraja	41,11	7,23	48,34	Tinggi	1,55	Tinggi
13.	Purwojati	9,75	6,36	16,12	Tinggi	2,01	Tinggi
14.	Ajibarang	31,93	2,74	34,69	Tinggi	1,91	Tinggi
15.	Gumelar	-	-	-	-	-	-
16.	Pekuncen	3,44	0,42	3,86	Sedang	1,53	Tinggi
17.	Cilongok	11,13	0,45	11,60	Sedang	1,92	Tinggi
18.	Karanglewas	29,35	0,51	29,86	Sedang	2,05	Tinggi
19.	Kedungbanteng	17,86	0,61	18,50	Sedang	1,97	Tinggi
20.	Baturraden	-	-	-	-	1,38	Tinggi
21.	Sumbang	7,22	0,08	7,32	Sedang	1,69	Tinggi
22.	Kembaran	33,23	5,73	38,96	Tinggi	1,87	Tinggi
23.	Sokaraja	144,19	8,93	153,14	Sedang	1,82	Tinggi
24.	Purwokerto Selatan	106,58	-	106,58	Sedang	1,37	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	52,92	0,29	53,21	Sedang	1,99	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	99,28	0,29	99,55	Sedang	2,00	Tinggi
27.	Purwokerto Utara	6,08	-	6,08	Sedang	2,01	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS		1.080,22	229,20	1.309,42	Tinggi	48,77	Tinggi

Tabel 6.1. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			
			UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	KELAS
1.	Lumbir	6.109	1.153	1	1.149	Tinggi
2.	Wangon	6.565	1.119	1	1.063	Tinggi
3.	Jatilawang	7.072	424	8	1.060	Tinggi
4.	Rawalo	5.780	1.020	6	1.000	Tinggi
5.	Kebasen	5.038	884	3	1.013	Tinggi
6.	Kemranjen	4.544	86	19	753	Tinggi
7.	Sumpiuh	4.247	797	11	564	Tinggi
8.	Tambak	4.499	808	16	642	Tinggi
9.	Somagede	4.566	847	10	754	Tinggi
10.	Kalibagor	3.616	600	6	777	Tinggi
11.	Banyumas	4.286	799	14	448	Tinggi
12.	Patikraja	4.131	712	7	639	Tinggi
13.	Purwojati	4.028	645	12	694	Tinggi
14.	Ajibarang	6.332	748	6	963	Tinggi
15.	Gumelar	5.248	978	23	924	Sedang
16.	Pekuncen	3.441	645	4	601	Tinggi
17.	Cilongok	5.717	1.053	0	956	Tinggi
18.	Karanglewas	5.310	936	4	733	Tinggi
19.	Kedungbanteng	4.602	827	6	711	Tinggi
20.	Baturraden	3.686	654	9	503	Tinggi
21.	Sumbang	3.778	653	11	765	Tinggi
22.	Kembaran	5.382	821	2	702	Tinggi
23.	Sokaraja	4.274	103	0	546	Tinggi
24.	Purwokerto Selatan	7.215	1.149	0	517	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	7.886	1.293	17	665	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	8.310	1.257	1	696	Tinggi
27.	Purwokerto Utara	6.435	903	4	579	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS		142.097	21.914	201	20.417	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

2. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim dalam hal ini adalah angin kencang merupakan angin dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara agraris balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi). Bahaya cuaca ekstrim dalam hal ini angin kencang disusun dengan metode skoring terhadap tiga parameter yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan berdasarkan Perka No. 2 BNPB Tahun 2012.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas memiliki tingkat risiko sedang terhadap bencana cuaca ekstrim. Hasil kajian kejadian bencana cuaca ekstrim tahun 2017 - 2021 diperoleh argumentasi

bahwa lokasi bencana cuaca ekstrim, selalu berpindah pindah dan tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadi. Hasil rekapitulasi dampak bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Banyumas selama beberapa tahun dapat dipaparkan antara lain dapat menimbulkan kerusakan rumah penduduk, fasilitas umum dan fasilitas sosial, tumbangnya pohon-pohon di kawasan hutan dan pemukiman termasuk jatuhnya korban jiwa manusia.

Bencana cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Banyumas terjadi akibat bentrokan pertemuan udara panas dan dingin yang kemudian membentuk awan Cumulonimbus. Kala awan terkena radiasi matahari, awan tersebut berubah vertikal. Di dalam awan vertikal tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembus kepermukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak. Bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Banyumas pernah terjadi di beberapa wilayah. Pada tahun 2021, cuaca ekstrim terjadi di Desa Gumelar, Desa Purwokerto Lor, dan Desa Karangdadap.

Tabel 7.1. Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Cuaca Ekstrim	-	589,68	4.947,21	5.536,89	Tinggi
Wangon	Cuaca Ekstrim	-	180,18	5.733,09	5.913,27	Tinggi
Jatilawang	Cuaca Ekstrim	-	179,73	4.387,68	4.567,41	Tinggi
Rawalo	Cuaca Ekstrim	-	697,77	4.105,08	4.802,85	Tinggi
Kebasen	Cuaca Ekstrim	-	276,93	1.949,49	2.226,42	Tinggi
Kemranjen	Cuaca Ekstrim	-	253,08	1.976,31	2.229,39	Tinggi
Sumpiuh	Cuaca Ekstrim	-	66,15	1.641,60	1.707,75	Tinggi
Tambak	Cuaca Ekstrim	-	40,23	1.720,71	1.760,94	Tinggi
Somagede	Cuaca Ekstrim	-	425,70	771,84	1.197,54	Tinggi
Kalibagor	Cuaca Ekstrim	-	362,52	3.632,31	3.994,83	Tinggi
Banyumas	Cuaca Ekstrim	-	66,60	1.154,34	1.220,94	Tinggi

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Patikraja	Cuaca Ekstrim	-	744,30	3.325,59	4.069,89	Tinggi
Purwojati	Cuaca Ekstrim	-	301,05	3.633,48	3.934,53	Tinggi
Ajibarang	Cuaca Ekstrim	-	320,40	5.107,32	5.427,72	Tinggi
Gumelar	Cuaca Ekstrim	-	594,00	5.186,88	5.780,88	Tinggi
Pekuncen	Cuaca Ekstrim	-	249,57	4.669,83	4.919,40	Tinggi
Cilongok	Cuaca Ekstrim	-	216,99	6.860,52	7.077,51	Tinggi
Karanglewas	Cuaca Ekstrim	-	106,47	2.622,69	2.729,16	Tinggi
Kedungbanteng	Cuaca Ekstrim	-	16,02	2.711,52	2.727,54	Tinggi
Baturraden	Cuaca Ekstrim	-	4,86	2.146,05	2.150,91	Tinggi
Sumbang	Cuaca Ekstrim	-	1,44	4.638,69	4.640,13	Tinggi
Kembaran	Cuaca Ekstrim	-	7,74	2.565,18	2.572,92	Tinggi
Sokaraja	Cuaca Ekstrim	-	26,82	3.035,43	3.062,25	Tinggi
Purwokerto Selatan	Cuaca Ekstrim	-	33,84	1.576,98	1.610,82	Tinggi
Purwokerto Barat	Cuaca Ekstrim	-	3,96	764,82	768,78	Tinggi
Purwokerto Timur	Cuaca Ekstrim	-	0,99	846,99	847,98	Tinggi
Purwokerto Utara	Cuaca Ekstrim	-	-	966,06	966,06	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS	Cuaca Ekstrim	-	5.767,02	82.677,69	88.444,71	Tinggi

((Sumber: Hasil Analisa KRB Tahun 2023 *) tanda strip (-) pada tabel menandakan tidak ada data pada daerah tersebut)

Berdasarkan tabel 7.1. terlihat besaran luas bahaya per kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian yaitu topografi dan keterbukaan lahan. Bencana ini terjadi pada wilayah di Kabupaten Banyumas yang topografinya relatif datar dan keterbukaan lahannya tinggi. Rekapitulasi kajian bahaya per kecamatan menentukan total luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten

Banyumas. Secara keseluruhan bencana cuaca ekstrim memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Banyumas dengan total 88.444,71 ha yang berada pada kategori Kelas Tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten Banyumas diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan.

Tabel 8.1. Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)			
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS
1.	Lumbir	123,47	268,74	392,21	Sedang
2.	Wangon	224,97	134,25	359,22	Tinggi
3.	Jatilawang	153,80	58,29	212,09	Sedang
4.	Rawalo	116,72	103,82	220,54	Tinggi
5.	Kebasen	87,26	12,14	99,40	Sedang
6.	Kemranjen	61,00	20,47	81,47	Tinggi
7.	Sumpiuh	51,52	20,19	71,71	Tinggi
8.	Tambak	42,58	11,16	53,74	Sedang
9.	Somagede	31,90	0,79	32,69	Sedang
10.	Kalibagor	118,47	35,43	153,90	Tinggi
11.	Banyumas	87,44	0,37	87,81	Sedang
12.	Patikraja	110,16	64,29	174,45	Tinggi
13.	Purwojati	80,62	37,51	118,13	Sedang
14.	Ajibarang	228,42	94,04	322,46	Sedang
15.	Gumelar	117,79	200,15	317,94	Tinggi
16.	Pekuncen	124,43	69,09	193,52	Sedang
17.	Cilongok	246,15	100,10	346,25	Sedang
18.	Karanglewas	149,71	19,21	168,92	Sedang
19.	Kedungbanteng	26,50	52,88	79,38	Sedang
20.	Baturraden	179,42	13,98	193,40	Sedang
21.	Sumbang	169,01	38,51	207,52	Sedang
22.	Kembaran	176,55	15,83	192,38	Sedang
23.	Sokaraja	216,56	19,19	235,75	Sedang
24.	Purwokerto Selatan	197,85	0,72	198,57	Sedang
25.	Purwokerto Barat	171,99	0,87	172,86	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	279,37	0,29	279,66	Sedang
27.	Purwokerto Utara	177,32	1,28	178,60	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS		3.705,98	1.393,59	5.144,57	Tinggi

Tabel 9.1. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Banyumas

N O	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			
			UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	KELAS
1.	Lumbir	50.159	9.491	15	9.259	Tinggi
2.	Wangon	84.137	14.818	11	12.167	Tinggi
3.	Jatilawang	66.891	977	70	9.353	Tinggi
4.	Rawalo	53.226	9.941	40	8.300	Tinggi
5.	Kebasen	67.827	11.891	32	10.256	Tinggi
6.	Kemranjen	72.859	739	279	10.034	Tinggi
7.	Sumpiuh	58.091	11.025	144	8.245	Tinggi
8.	Tambak	50.639	9.109	180	7.611	Tinggi
9.	Somagede	37.847	7.029	49	6.732	Tinggi
10.	Kalibagor	57.624	9.470	65	6.968	Tinggi
11.	Banyumas	53.221	10.009	109	6.579	Tinggi
12.	Patikraja	61.255	10.510	122	9.168	Tinggi
13.	Purwojati	37.347	5.903	126	6.546	Tinggi
14.	Ajibarang	102.808	11.635	112	15.313	Tinggi
15.	Gumelar	53.794	10.633	163	8.297	Tinggi
16.	Pekuncen	76.150	14.319	95	13.208	Tinggi
17.	Cilongok	125.349	23.034	9	19.621	Tinggi
18.	Karanglewas	67.800	11.953	77	9.731	Tinggi
19.	Kedungbanteng	62.331	11.234	66	9.409	Tinggi
20.	Baturraden	53.751	8.141	192	7.893	Tinggi
21.	Sumbang	94.438	16.000	225	15.055	Tinggi
22.	Kembaran	82.085	13.232	27	9.906	Tinggi
23.	Sokaraja	89.766	805	9	10.103	Tinggi
24.	Purwokerto Selatan	72.608	11.721	2	5.299	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	53.024	8.723	137	4.468	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	54.815	8.502	9	4.140	Tinggi
27.	Purwokerto Utara	49.788	6.509	31	3.886	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS		1.789.630	267.352	2.396	247.547	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

3. Kekeringan

Kekeringan terjadi karena faktor alam dan non alam, dimana kondisi curah hujan kurang dan ditambah jumlah bulan kering yang cukup panjang selain kerusakan sumber air alam dan penyimoan air tanah habis akibat penggundulan kawasan hijau. Pengelolaan sumberdaya air yang belum baik memperbesar masalah kekeringan, termasuk juga adanya perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Banyumas yang merusak wilayah resapan tanah (*sponge*) pada wilayah hikau. Air sebagai penunjang kebutuhan masyarakat menjadi hal penting untuk kehidupan sehingga jika terjadi bencana kekeringan akan sangat mengganggu segala aktivitas masyarakat setempat. Bencana kekeringan pernah terjadi di beberapa wilayah, berikut merupakan desa yang pernah terjadi bencana kekeringan pada tahun 2019 yaitu Desa Karanganyar.

Tabel 10.1. Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Kekeringan	-	3.276,43	7.539,43	10.815,86	Tinggi
Wangon	Kekeringan	-	2.746,87	4.191,09	6.937,96	Tinggi
Jatilawang	Kekeringan	-	1.925,65	2.977,01	4.902,66	Tinggi
Rawalo	Kekeringan	-	-	5.133,10	5.133,10	Tinggi
Kebasen	Kekeringan	-	5.270,47	-	5.270,47	Sedang
Kemranjen	Kekeringan	-	-	6.287,27	6.287,27	Tinggi
Sumpiuh	Kekeringan	-	-	6.138,45	6.138,45	Tinggi
Tambak	Kekeringan	-	-	5.343,36	5.343,36	Tinggi
Somagede	Kekeringan	-	-	4.373,88	4.373,88	Tinggi
Kalibagor	Kekeringan	-	-	4.042,75	4.042,75	Tinggi
Banyumas	Kekeringan	-	-	4.175,54	4.175,54	Tinggi
Patikraja	Kekeringan	-	4.523,61	38,41	4.562,02	Sedang
Purwojati	Kekeringan	-	259,20	3.974,84	4.234,04	Tinggi
Ajibarang	Kekeringan	-	6.882,19	-	6.882,19	Sedang
Gumelar	Kekeringan	-	8.892,60	361,80	9.254,40	Sedang
Pekuncen	Kekeringan	-	468,73	7.870,39	8.339,12	Tinggi

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Cilongok	Kekeringan	-	13.421,14	-	13.421,14	Sedang
Karanglewas	Kekeringan	-	3.274,18	-	3.274,18	Sedang
Kedungbanteng	Kekeringan	-	5.622,10	-	5.622,10	Sedang
Baturraden	Kekeringan	-	4.577,45	-	4.577,45	Sedang
Sumbang	Kekeringan	-	5.685,44	-	5.685,44	Sedang
Kembaran	Kekeringan	-	2.602,94	-	2.602,94	Sedang
Sokaraja	Kekeringan	-	3.072,76	-	3.072,76	Sedang
Purwokerto Selatan	Kekeringan	-	1.610,88	-	1.610,88	Sedang
Purwokerto Barat	Kekeringan	-	767,42	-	767,42	Sedang
Purwokerto Timur	Kekeringan	-	848,15	-	848,15	Sedang
Purwokerto Utara	Kekeringan	-	966,37	-	966,37	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS	Kekeringan	-	76.694,58	62.447,32	139.142	Tinggi

(Sumber: Hasil Analisa KRB Tahun 2023 *) tanda strip (-) pada tabel menandakan tidak ada data pada daerah tersebut)

Berdasarkan tabel 10.1. terlihat besaran luas bahaya per kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian. Rekapitulasi kajian bahaya per kecamatan menentukan total luas bahaya kekeringan di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana kekeringan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Banyumas dengan total 139.142 ha yang berada pada kategori Kelas Tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten Banyumas diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan.

Tabel 11.1. Potensi Kerugian Bencana Kekeringan di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	LUAS	KELAS
1.	Lumbir	-	281,56	281,56	Sedang	-	-
2.	Wangon	-	136,33	136,33	Sedang	-	-
3.	Jatilawang	-	59,46	59,46	Rendah	7,99	Sedang
4.	Rawalo	-	105,06	105,06	Sedang	3,00	Sedang
5.	Kebasen	-	18,55	18,55	Rendah	42,50	Sedang
6.	Kemranjen	-	23,28	23,28	Rendah	-	-
7.	Sumpiuh	-	26,80	26,80	Sedang	-	-
8.	Tambak	-	15,76	15,76	Rendah	-	-
9.	Somagede	-	2,80	2,80	Rendah	-	-
10.	Kalibagor	-	35,43	35,43	Sedang	-	-
11.	Banyumas	-	2,36	2,36	Rendah	-	-
12.	Patikraja	-	84,47	84,47	Sedang	36,98	Sedang
13.	Purwojati	-	38,39	38,39	Rendah	2,50	Sedang
14.	Ajibarang	-	100,28	100,28	Rendah	4,97	Sedang
15.	Gumelar	-	203,17	203,17	Sedang	9,50	Sedang
16.	Pekuncen	-	95,79	95,79	Sedang	902,01	Tinggi
17.	Cilongok	-	114,16	114,16	Rendah	2.026,51	Tinggi
18.	Karanglewas	-	22,03	22,03	Sedang	31,00	Sedang
19.	Kedungbanteng	-	59,02	59,02	Sedang	909,52	Tinggi
20.	Baturraden	-	26,76	26,76	Sedang	776,50	Tinggi
21.	Sumbang	-	47,76	47,76	Rendah	302,01	Tinggi
22.	Kembaran	-	17,05	17,05	Rendah	-	-
23.	Sokaraja	-	21,28	21,28	Rendah	-	-
24.	Purwokerto Selatan	-	1,04	1,04	Rendah	-	-
25.	Purwokerto Barat	-	0,87	0,87	Sedang	-	-
26.	Purwokerto Timur	-	0,29	0,29	Rendah	-	-
27.	Purwokerto Utara	-	1,28	1,28	Rendah	-	-
KABUPATEN BANYUMAS		-	1.541,03	1.541,03	Sedang	5.054,99	Tinggi

Tabel 12.1. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			
			UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	KELAS
1.	Lumbir	50.159	9.491	15	9.259	Tinggi
2.	Wangon	84.137	14.818	11	12.167	Tinggi
3.	Jatilawang	66.891	977	70	9.353	Tinggi
4.	Rawalo	53.226	9.941	40	8.300	Tinggi
5.	Kebasen	67.827	11.891	32	10.256	Tinggi
6.	Kemranjen	72.859	739	279	10.034	Tinggi
7.	Sumpiuh	58.091	11.025	144	8.245	Tinggi
8.	Tambak	50.639	9.109	180	7.611	Tinggi
9.	Somagede	37.847	7.029	49	6.732	Tinggi
10.	Kalibagor	57.624	9.470	65	6.968	Tinggi
11.	Banyumas	53.221	10.009	109	6.579	Tinggi
12.	Patikraja	61.255	10.510	122	9.168	Tinggi
13.	Purwojati	37.347	5.903	126	6.546	Tinggi
14.	Ajibarang	102.808	11.635	112	15.313	Tinggi
15.	Gumelar	53.794	10.633	163	8.297	Tinggi
16.	Pekuncen	76.150	14.319	95	13.208	Tinggi
17.	Cilongok	125.349	23.034	9	19.621	Tinggi
18.	Karanglewas	67.800	11.953	77	9.731	Tinggi
19.	Kedungbanteng	62.331	11.234	66	9.409	Tinggi
20.	Baturraden	53.751	9.433	192	7.893	Tinggi
21.	Sumbang	94.438	16.000	225	15.055	Tinggi
22.	Kembaran	82.085	13.232	27	9.906	Tinggi
23.	Sokaraja	89.766	805	9	10.103	Tinggi
24.	Purwokerto Selatan	72.608	11.721	2	5.299	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	53.024	8.723	137	4.468	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	54.815	8.502	9	4.140	Tinggi
27.	Purwokerto Utara	49.788	6.509	31	3.886	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS		1.789.630	268.645	2.396	247.547	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

4. Tanah Longsor

Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas secara kejadian, adalah kasus paling sering dan merata disetiap kecamatan. Ini menjadi Risiko Bencana cukup serius untuk ditangani. Curah hujan dan factor

geologi kawasan menjadi penyebab utama kejadian longsor di hampir semua wilayah di Kabupaten Banyumas. Berikut adalah sebaran kejadian bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas,

Tabel 13.1. Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Tanah Longsor	5.511,15	657,00	2.323,89	8.492,04	Rendah
Wangon	Tanah Longsor	2.412,63	141,21	702,36	3.256,20	Tinggi
Jatilawang	Tanah Longsor	1.483,11	93,69	675,54	2.252,34	Rendah
Rawalo	Tanah Longsor	1.251,81	192,78	423,72	1.868,31	Rendah
Kebasen	Tanah Longsor	2.685,96	801,45	2.027,61	5.515,02	Tinggi
Kemranjen	Tanah Longsor	302,49	326,07	1.498,59	2.127,15	Tinggi
Sumpiuh	Tanah Longsor	1.101,96	734,22	1.142,37	2.978,55	Tinggi
Tambak	Tanah Longsor	803,97	331,74	981,63	2.117,34	Tinggi
Somagede	Tanah Longsor	1.891,98	1.028,79	2.050,20	4.970,97	Tinggi
Kalibagor	Tanah Longsor	685,62	0,72	-	686,34	Rendah
Banyumas	Tanah Longsor	317,70	170,10	1.488,69	1.976,49	Tinggi
Patikraja	Tanah Longsor	375,21	209,16	1.284,30	1.868,67	Tinggi
Purwojati	Tanah Longsor	1.417,14	167,76	670,05	2.254,95	Tinggi

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Ajibarang	Tanah Longsor	679,86	138,69	2.534,94	3.353,49	Tinggi
Gumelar	Tanah Longsor	5.451,93	376,20	1.823,76	7.651,89	Tinggi
Pekuncen	Tanah Longsor	2.280,60	207,90	1.191,33	3.679,83	Tinggi
Cilongok	Tanah Longsor	3.769,83	310,05	1.930,59	6.010,47	Tinggi
Karanglewas	Tanah Longsor	766,80	69,48	574,92	1.411,20	Tinggi
Kedungbanteng	Tanah Longsor	980,55	450,00	1.309,14	2.739,69	Tinggi
Baturraden	Tanah Longsor	898,20	41,58	1.484,82	2.424,60	Tinggi
Sumbang	Tanah Longsor	1.000,71	94,77	825,93	1.921,41	Tinggi
Kembaran	Tanah Longsor	175,86	2,16	13,32	191,34	Rendah
Sokaraja	Tanah Longsor	147,06	-	-	147,06	Rendah
Purwokerto Selatan	Tanah Longsor	79,74	2,52	1,80	84,06	Rendah
Purwokerto Barat	Tanah Longsor	56,43	-	-	56,43	Rendah
Purwokerto Timur	Tanah Longsor	20,16	-	-	20,16	Rendah
Purwokerto Utara	Tanah Longsor	39,33	-	-	39,33	Rendah
KABUPATEN BANYUMAS	Tanah Longsor	36.587,79	6.548,04	26.959,50	70.095,33	Tinggi

((Sumber: Hasil Analisa KRB Tahun 2022 *) tanda strip (-) pada tabel menandakan tidak ada data pada daerah tersebut)

Berdasarkan tabel 13.1. di atas, terlihat besaran luas bahaya per kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian. Rekapitulasi kajian bahaya per kecamatan menentukan total luas bahaya Tanah Longsor untuk Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana Tanah Longsor memiliki potensi luas bahaya sebesar 70.095,33 ha yang berada pada kategori Kelas Tinggi. Kelas bahaya longsor Tinggi Kabupaten Banyumas berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana.

Tabel 14.1. Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	LUAS	KELAS
1.	Lumbir	37,95	274,17	312,10	Tinggi	-	-
2.	Wangon	13,96	75,46	89,41	Tinggi	-	-
3.	Jatilawang	5,77	17,59	23,34	Tinggi	4,51	Sedang
4.	Rawalo	7,67	54,08	61,73	Tinggi	4,01	Sedang
5.	Kebasen	34,27	6,69	40,94	Tinggi	29,75	Sedang
6.	Sumpiuh	26,47	2,10	28,52	Tinggi	-	-
7.	Kemranjen	21,65	12,13	33,77	Tinggi	-	-
8.	Tambak	11,78	8,38	20,17	Tinggi	-	-
9.	Somagede	33,02	3,00	36,02	Tinggi	-	-
10.	Kalibagor	0,35	0,11	0,45	Rendah	-	-
11.	Banyumas	17,42	1,56	19,00	Tinggi	-	-
12.	Patikraja	15,94	26,73	42,69	Tinggi	28,83	Sedang
13.	Purwojati	17,79	18,03	35,82	Tinggi	-	-
14.	Ajibarang	31,37	98,94	130,31	Tinggi	9,56	Sedang
15.	Gumelar	59,35	219,21	278,56	Tinggi	11,99	Sedang
16.	Pekuncen	25,01	55,75	80,76	Tinggi	587,40	Tinggi
17.	Cilongok	32,16	71,24	103,41	Tinggi	1.708,36	Tinggi
18.	Karanglewas	18,98	23,44	42,41	Tinggi	29,39	Sedang
19.	Kedungbanteng	36,59	58,25	94,84	Tinggi	834,22	Tinggi
20.	Baturraden	4,95	10,84	15,80	Tinggi	571,66	Tinggi
21.	Sumbang	5,61	16,12	21,72	Tinggi	254,74	Tinggi
22.	Kembaran	-	-	-	-	-	-
23.	Sokaraja	-	-	-	-	-	-
24.	Purwokerto Selatan	0,03	0,06	0,11	Sedang	-	-
25.	Purwokerto Barat	-	-	-	-	-	-
26.	Purwokerto Timur	-	-	-	-	-	-
27.	Purwokerto Utara	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN BANYUMAS		458,09	1.053,88	1.511,88	Tinggi	4.074,42	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

Tabel 15.1. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			
			UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	KELAS
1.	Lumbir	6.471	1.224	1	1.149	Sedang
2.	Wangon	8.168	1.439	1	1.063	Tinggi
3.	Jatilawang	7.891	115	8	1.060	Tinggi
4.	Rawalo	6.529	1.219	6	1.000	Tinggi
5.	Kebasen	6.712	1.177	3	1.013	Tinggi
6.	Kemranjen	5.867	59	19	753	Tinggi
7.	Sumpiuh	4.492	853	11	564	Tinggi
8.	Tambak	4.266	767	16	642	Sedang
9.	Somagede	4.342	806	10	754	Tinggi
10.	Kalibagor	6.630	1.091	6	777	Tinggi
11.	Banyumas	4.007	754	14	448	Tinggi
12.	Patikraja	3.744	642	7	639	Tinggi
13.	Purwojati	3.954	625	12	694	Tinggi
14.	Ajibarang	7.000	792	6	963	Tinggi
15.	Gumelar	6.365	1.258	23	924	Tinggi
16.	Pekuncen	3.506	659	4	601	Tinggi
17.	Cilongok	6.355	1.168	0	956	Tinggi
18.	Karanglewas	5.327	939	4	733	Tinggi
19.	Kedungbanteng	5.270	949	6	711	Tinggi
20.	Baturraden	3.882	681	9	503	Tinggi
21.	Sumbang	4.735	802	11	765	Tinggi
22.	Kembaran	6.879	1.109	2	693	Sedang
23.	Sokaraja	5.064	45	0	546	Sedang
24.	Purwokerto Selatan	7.175	1.158	0	517	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	7.953	1.308	17	665	Sedang
26.	Purwokerto Timur	9.023	1.400	1	696	Tinggi
27.	Purwokerto Utara	7.627	997	4	579	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS		159.234	24.036	201	20.408	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

5. Gempabumi

Angaka potensi bencana gempa bumi di Kabupaten Banyumas juga cukup menjadi konsen terkait domino kejadian bencana lain seperti patahan dan longsor diberbagai tempat (sebaran merata) di masing masing kecamatan.

Tabel 16.1.Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Gempabumi	10.468,91	346,95	-	10.815,86	Rendah
Wangon	Gempabumi	4.986,65	1.951,29	-	6.937,94	Sedang
Jatilawang	Gempabumi	2.672,01	2.230,65	-	4.902,66	Sedang
Rawalo	Gempabumi	3.256,78	1.876,32	-	5.133,10	Sedang
Kebasen	Gempabumi	4.401,86	868,61	-	5.270,47	Sedang
Kemranjen	Gempabumi	5.158,87	1.128,42	-	6.287,29	Sedang
Sumpiuh	Gempabumi	5.120,10	1.018,35	-	6.138,45	Sedang
Tambak	Gempabumi	3.989,76	1.353,60	-	5.343,36	Sedang
Somagede	Gempabumi	3.977,79	396,09	-	4.373,88	Rendah
Kalibagor	Gempabumi	3.104,59	938,16	-	4.042,75	Sedang
Banyumas	Gempabumi	3.539,73	635,81	-	4.175,54	Sedang
Patikraja	Gempabumi	3.565,22	996,80	-	4.562,02	Sedang
Purwojati	Gempabumi	3.230,63	1.003,41	-	4.234,04	Rendah
Ajibarang	Gempabumi	5.863,62	1.018,56	-	6.882,19	Sedang
Gumelar	Gempabumi	8.975,94	278,46	-	9.254,40	Rendah
Pekuncen	Gempabumi	7.406,11	933,01	-	8.339,12	Rendah
Cilogok	Gempabumi	12.103,76	1.317,38	-	13.421,14	Sedang
Karanglewas	Gempabumi	2.424,01	850,16	-	3.274,18	Sedang
Kedungbanteng	Gempabumi	4.754,39	867,71	-	5.622,10	Sedang
Baturraden	Gempabumi	3.963,15	614,30	-	4.577,45	Sedang
Sumbang	Gempabumi	4.835,66	849,78	-	5.685,44	Sedang
Kembaran	Gempabumi	980,41	1.622,53	-	2.602,94	Sedang
Sokaraja	Gempabumi	1.424,65	1.648,11	-	3.072,76	Sedang
Purwokerto Selatan	Gempabumi	558,15	1.052,73	-	1.610,88	Sedang
Purwokerto Barat	Gempabumi	177,20	590,22	-	767,42	Sedang
Purwokerto Timur	Gempabumi	65,06	783,09	-	848,15	Sedang

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Purwokerto Utara	Gempabumi	239,35	727,02	-	966,37	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS	Gempabumi	111.244,36	27.897,52	-	139.142	Sedang

Berdasarkan tabel 16.1. terlihat besaran luas bahaya suatu kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian terutama topografi dan jauh dekatnya dengan patahan. Berdasarkan kajian potensi bencana gempabumi lebih tinggi pada wilayah di Kabupaten Banyumas yang topografinya datar dan dilalui atau dekat dengan patahan. Rekapitulasi kajian bahaya per kecamatan menentukan total luas bahaya gempabumi untuk Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana gempabumi memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Banyumas adalah 139.142 ha yang berada pada Kelas Sedang. Kelas bahaya sedang Kabupaten Banyumas berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana.

Tabel 17.1. Potensi Kerugian Bencana Gempabumi di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)			
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS
1.	Lumbir	2,66	0,87	3,50	Tinggi
2.	Wangon	91,93	7,28	99,21	Tinggi
3.	Jatilawang	81,24	27,54	108,77	Sedang
4.	Rawalo	52,43	40,68	93,12	Tinggi
5.	Kebasen	33,85	12,22	46,08	Tinggi
6.	Sumpiuh	37,77	20,47	58,23	Tinggi
7.	Kemranjen	48,60	20,18	68,81	Tinggi
8.	Tambak	36,36	11,17	47,53	Sedang
9.	Somagede	6,12	-	6,12	Sedang
10.	Kalibagor	38,13	12,52	50,66	Tinggi
11.	Banyumas	61,99	-	61,99	Sedang
12.	Patikraja	23,25	10,10	33,35	Tinggi
13.	Purwojati	4,60	1,21	5,81	Sedang
14.	Ajibarang	18,77	0,67	19,45	Sedang
15.	Gumelar	0,15	-	0,15	Sedang
16.	Pekuncen	2,29	0,28	2,58	Sedang
17.	Cilongok	7,48	0,27	7,74	Sedang
18.	Karanglewas	23,01	0,49	23,50	Tinggi
19.	Kedungbanteng	28,89	5,42	34,33	Tinggi
20.	Baturraden	11,24	0,19	11,43	Tinggi
21.	Sumbang	24,98	0,74	25,70	Sedang
22.	Kembaran	116,46	12,18	128,62	Tinggi
23.	Sokaraja	168,95	11,18	180,14	Sedang
24.	Purwokerto Selatan	192,55	-	192,55	Sedang
25.	Purwokerto Barat	85,62	0,57	86,20	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	225,14	0,29	225,41	Sedang
27.	Purwokerto Utara	133,40	0,98	134,39	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS		1.557,86	197,5	1.755,37	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

Tabel 18.1. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			
			UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	KELAS
1.	Lumbir	50.159	9.491	15	9.259	Tinggi
2.	Wangon	84.137	14.818	11	12.167	Tinggi
3.	Jatilawang	66.891	977	70	9.353	Tinggi
4.	Rawalo	53.226	9.941	40	8.300	Tinggi
5.	Kebasen	67.827	11.891	32	10.256	Tinggi
6.	Kemranjen	72.859	739	279	10.034	Tinggi
7.	Sumpiuh	58.091	11.025	144	8.245	Tinggi
8.	Tambak	50.639	9.109	180	7.611	Tinggi
9.	Somagede	37.847	7.029	49	6.732	Tinggi
10.	Kalibagor	57.624	9.470	65	6.968	Tinggi
11.	Banyumas	53.221	10.009	109	6.579	Tinggi
12.	Patikraja	61.255	10.510	122	9.168	Tinggi
13.	Purwojati	37.347	5.903	126	6.546	Tinggi
14.	Ajibarang	102.808	11.635	112	15.313	Tinggi
15.	Gumelar	53.794	10.633	163	8.297	Tinggi
16.	Pekuncen	76.150	14.319	95	13.208	Tinggi
17.	Cilongok	125.349	23.034	9	19.621	Tinggi
18.	Karanglewas	67.800	11.953	77	9.731	Tinggi
19.	Kedungbanteng	62.331	11.234	66	9.409	Tinggi
20.	Baturraden	53.751	9.433	192	7.893	Tinggi
21.	Sumbang	94.438	16.000	225	15.055	Tinggi
22.	Kembaran	82.085	13.232	27	9.906	Tinggi
23.	Sokaraja	89.766	805	9	10.103	Tinggi
24.	Purwokerto Selatan	72.608	11.721	2	5.299	Tinggi
25.	Purwokerto Barat	53.024	8.723	137	4.468	Tinggi
26.	Purwokerto Timur	54.815	8.502	9	4.140	Tinggi
27.	Purwokerto Utara	49.788	6.509	31	3.886	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS		1.789.630	268.645	2.396	247.547	Tinggi

(Sumber: Data KRB,2022)

6. Kebakaran Hutan dan Lahan

Angka Karhutla di Kabupaten Banyumas secara potensi dan risiko cukup rendah, ini menjadi prestasi dan perhatian untuk mempertahankan kondisi yang ada, gunaantisipasi bencana kekeringan yang secara risiko lebih tinggi untuk menjadi factor predisposisi karhutla dibeberapa wilayah di Kabupaten Banyumas.

Tabel 19.1. Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Lumbir	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	1.657,71	-	1.657,71	Sedang
Wangon	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	48,33	-	48,33	Sedang
Jatilawang	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	24,93	-	24,93	Sedang
Sumpiuh	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	125,01	125,01	Tinggi
Ajibarang	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	50,40	-	50,40	Sedang
Gumelar	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	1.079,91	-	1.079,91	Sedang
Pekuncen	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.642,41	-	-	1.642,41	Rendah
Cilongok	Kebakaran Hutan dan Lahan	4.223,70	-	-	4.223,70	Rendah
Karanglewas	Kebakaran Hutan dan Lahan	16,83	-	-	16,83	Sedang
Kedungbanteng	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.779,48	-	-	1.779,48	Rendah

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Baturraden	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.831,32	-	-	1.831,32	Rendah
Sumbang	Kebakaran Hutan dan Lahan	801,81	-	-	801,81	Sedang
KABUPATEN BANYUMAS	Kebakaran Hutan dan Lahan	10.295,55	2.861,28	125,01	13.281,84	Tinggi

(Sumber: Hasil Analisa Tahun KRB 2023 *) tanda strip (-) pada tabel menandakan tidak ada data pada daerah tersebut)

Berdasarkan tabel 19.1, terlihat besaran luas bahaya suatu kecamatan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian. Rekapitulasi kajian bahaya per kecamatan menentukan total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Banyumas dengan total 13.281,84 ha yang berada pada Kelas Tinggi.

Tabel 20.1. Potensi Kerugian Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		LUAS	KELAS
1.	Lumbir	1.685	Rendah
2.	Wangon	50	Rendah
3.	Jatilawang	485	Rendah
4.	Sumpiuh	125	Rendah
5.	Ajibarang	52	Rendah
6.	Gumelar	1.102	Rendah
7.	Pekuncen	539	Rendah
8.	Cilongok	2.482	Rendah
9.	Karanglewas	16	Rendah
10.	Kedungbanteng	909	Rendah
11.	Baturraden	1.435	Rendah
12.	Sumbang	807	Rendah
KABUPATEN BANYUMAS		9.687	Rendah

(Sumber: Data KRB,2022)

7. Letusan Gunungapi Slamet

Beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas secara langsung berada di *ring of fire*, Gunung Slamet. Ini tentu juga menjadi kewaspadaan tersendiri, mengingat Gunung Api Slamet masih berstatus aktif, dan berpotensi menimbulkan bencana serius pada periode maupun siklus letusan yang terjadi.

Tabel 21.1. Potensi Luas Bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Baturraden	Letusan Gunungapi Slamet	918,54	1.065,60	425,43	2.409,57	Sedang
Cilongok	Letusan Gunungapi Slamet	564,21	-	-	564,21	Rendah
Karanglewas	Letusan Gunungapi Slamet	114,75	-	-	114,75	Rendah
Kedungbanteng	Letusan Gunungapi Slamet	537,21	656,10	39,24	1.232,55	Sedang
Purwokerto Utara	Letusan Gunungapi Slamet	37,71	-	-	37,71	Rendah
Sumbang	Letusan Gunungapi Slamet	813,42	518,13	214,02	1.545,57	Rendah
KABUPATEN BANYUMAS	Letusan Gunungapi Slamet	2.985,84	2.239,83	678,69	5.904,36	Sedang

((Sumber: Hasil Analisa Tahun 2022 *) tanda strip (-) pada tabel menandakan tidak ada data pada daerah tersebut)

Tabel 21.1. menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya letusan gunungapi Slamet di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan bencana letusan gunungapi Slamet memiliki total potensi luas bahaya 5.904,36 ha yang berada pada kategori Kelas Sedang. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten Banyumas diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan.

Tabel 22.1. Potensi Kerugian Bencana Letusan Gunungapi Slamet di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	LUAS	KELAS
1.	Cilongok	-	-	-	-	-	-
2.	Karanglewas	-	-	-	-	-	-
3.	Kedungbanteng	-	-	-	-	161,78	Tinggi
4.	Baturraden	1,06	0,01	1,08	Sedang	579,92	Tinggi
5.	Sumbang	0,01	-	0,01	Sedang	202,07	Tinggi
6.	Purwokerto Utara	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN BANYUMAS		1,07	0,01	1,09	Sedang	943,77	Tinggi

(Sumber:Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2027)

Tabel 23.1. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN (JIWA)			KELAS
			UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1.	Cilongok	403	74	-	70	Rendah
2.	Karanglewas	1.620	286	0	252	Tinggi
3.	Kedungbanteng	2.714	489	2	377	Tinggi
4.	Baturraden	3.882	681	9	503	Tinggi
5.	Sumbang	3.593	609	8	592	Tinggi
6.	Purwokerto Utara	3.525	461	3	309	Tinggi
KABUPATEN BANYUMAS		15.737	2.600	22	2.103	Tinggi

(Sumber:Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2027)

1.3. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana

Sajian pada matriks dibawah ini, merujuk dari Kajian Risiko Bencana Taun 2023 - 2027 dan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024 - 2028 Kabupaten Banyumas, diperoleh matrik prioritas penanganan berdasarkan ancaman, bahaya, kapasitas, dan risiko bencana eksisting (Ha).

Tabel 24.1. Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Banyumas

Prioritas Penanganan		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Kejadian	Menurun		<ul style="list-style-type: none"> Letusan Gunung Api Slamet 	
	Tetap		<ul style="list-style-type: none"> Karhutla Gempabumi Kekeringan 	
	Meningkat			<ul style="list-style-type: none"> Tanah Longsor Banjir Cuaca Ekstrim
PRIORITAS RISIKO YANG DITANGANI (PENCEGAHAN, MITIGASI, KESIAPSIAGAAN)		Prioritas Risiko Bencana yang ditangani adalah BANJIR, TANAH LONGSOR, & CUACA EKSTRIM dilakukan dengan melakukan aksi pengurangan risiko bencana berupa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan		
NON PRIORITAS RISIKO YANG DITANGANI (PENCEGAHAN DAN MITIGASI)		Non Prioritas Risiko Bencana yang ditangani adalah KEKERINGAN, KARHUTLA, GEMPABUMI, DAN LETUSAN GUNUNG SLAMET dilakukan dengan melakukan aksi pengurangan risiko bencana bersifat umum (kebijakan dan perencanaan) berupa pencegahan dan mitigasi		

(Sumber: Kajian Risiko Bencana Tahun 2023-2027 dan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028 Kabupaten Banyumas)

1.4. Skenario Kejadian

Skenario kejadian diuraikan dalam bentuk matriks di bawah ini:

(Contoh)

Terjadinya Bencana	:	Bencana Hidrometeorologi terjadi hari Sabtu dini hari (Malam Hari)
Waktu Kejadian	:	Puncak musim hujan bulan Januari pada malam hari pukul 23.00 WIB
Lokasi	:	Kecamatan X dan Y
Pemicu	:	Hujan Lebat disertai angin kencang dari arah selatan.
Penyebab spesifik	:	a. Intensitas curah hujan tinggi, Area Cekungan dengan padanan tebing tinggi, liqufaksi tanah akibat peningkatan beban oleh peningkatan volume air resapan dalam tanah; b. Faktor predisposisi seperti karakteristik tanah mudah roboh.
Bahaya Primer	:	Sepanjang laporan kejadian bencana dari tahun 2020 - 2022 kedua kecamatan memiliki kejadian longsor yang merata di semua titik (sebaran) dengan penyebab utama adlah peningkatan curah hujan
Peringatan Dini Bencana	:	a. Peringatan dini bencana Hidrometeorologi di informasikan secara langsung oleh BMKG dan PVMBG, maupun Peringatan dini bencana longsor dikeluarkan melalui sinyal ews (<i>Early Warning System</i>) yang terpasang di penjuru titik lokasi kejadian (<u>dalam asumsi</u>)
Cakupan Wilayah Terdampak	:	a. Kecamatan X ▪ DESA AA b. Kecamatan Y ▪ DESA BB
Bahaya Sekunder	:	a. Terjadi bencana Hidrometeorologi meluas dengan peningkatan korban jiwa

b. Terjadinya Pergerakan Tanah di Wilayah Rawan Gerakan Tanah Sedang dan tinggi secara bersama-sama, memutuskan aliran listrik, akses jalan, kerusakan pemukiman

Bahaya : Wabah Penyakit (Endemi & Pandemi)
Pendamping

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2019 dan Analisis kesesuaian.2024)

Penentu pokok yang harus terpenuhi dalam scenario penetapan suatu wilayah masuk dalam status keadaan/status darurat bencana adalah adanya dua faktor besar, diantaranya:

1) Gangguan Kehidupan

Suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian. Menurut Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang/skelompok orang yang mengalami luka (luka ringan, sedang, dan berat) atau sakit atau hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal di tempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak bencana.
- b. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.

2) Gangguan Penghidupan

Suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis dengan penjelasan:

- a. Kerusakan Prasarana dan sarana meliputi perubahan langsung pada bentuk asset dan infrastruktur sehingga terganggu fungsi dasarnya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari bencana.
- b. Kerusakan Lingkungan dengan adanya perubahan langsung pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana.

- c. Kerugian yang ditandai dengan meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan asset sebagai akibat langsung bencana.
- d. Dampak Psikologis dengan adanya atau terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dalam menghadapi stress akibat langsung bencana

1.5. Asumsi Dampak

Bagian ini memuat tentang perkiraan akibat atau dampak langsung dari kejadian bencana sesuai Skenario Kejadian yang ditetapkan. Identifikasi akibat/dampak langsung dituangkan dalam 5 aspek, yaitu kependudukan, fisik/infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan layanan publik/pemerintahan. Identifikasi dampak langsung menjadi pertimbangan penyusunan sektor-sektor atau bidang dan kegiatan penanganan kedaruratan. Asumsi dampak dapat disajikan dalam format tabel.

Aspek Kependudukan, perkiraan tentang jumlah dan kondisi (meninggal, luka, mengungsi). Detail data terpilah sebaiknya dirincikan dalam Lampiran Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak. Data pilah penduduk dapat disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, kerentanan; bayi, balita, bumil, busui, sakit, lansia, difabel, maupun penduduk dengan komorbid.

Asumsi dampak aspek kependudukan (jiwa terdampak) dalam kejadian bencana hidrometeorologi, digambarkan dalam bentuk matrik seperti dibawah ini, pada table matrik ini, disajikan data kelompok rentan yang berpotensi tinggi menjadi korban bencana dengan maksud, bahwa memprioritaskan penanganan pada kelompok rentan menjadi hal yang utama, agar secara teknis kelompok rentan yang menjadi risiko tinggi korban bencana dapat ditangani dengan efektif. Selain kelompok rentan pada table matrik ini juga disajikan perhitungan asumsi kondisi korban bencana dengan beberapa klaster guna menjadi *forcase* dalam pemenuhan kebutuhan dan disparitas yang ada

KECAMATAN ¹	DESA	JUMLAH PENDUDUK					PEKERJAAN MAYORITAS PENDUDUK LOKAL	KELOMPOK RENTAN ²													ASUMSI JUMLAH KORBAN TERDAMPAK BENCANA ³							
		LAKI LAKI	%	PEREMPUAN	%	TOTAL		%														KONDISI						
									ANAK (0-14 TAHUN)	%	LANJIA (>60 TAHUN)	%	IBU HAMIL	%	IBU MENYUSUI	%	DISABILITAS	%	TOTAL	%	HILANG (2%)	MENINGGAL (1%)	RINGAN (80%)	SEDANG (15%)	BERAT (2%)	TOTAL		
GUMELAR ¹⁰	GUMELAR	4.927	50,91%	4.927	49,49%	9.754	100%	Petani/Petakebun	1.015	10,6%	813	8,3%	55	0,5%	21	0,2%	7	0,1%	2.611	26,74%	50	0,5%	25	0,2%	2009	377	50	2511
	SAMUDRA KULON	1.584	51,53%	1.490	48,47%	3.074	100%	Petani/Petakebun	490	16,1%	588	19,1%	12	0,4%	80	2,6%	8	0,3%	1.182	37,80%	23	0,2%	12	0,1%	930	174	23	1182
	CIHONJIE	4.257	49,39%	4.382	50,61%	8.639	100%	Petani/Petakebun	1.593	18,5%	1.804	20,9%	16	0,2%	48	0,6%	33	0,4%	3.494	40,54%	70	0,8%	35	0,4%	2795	524	70	3404

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2019 dan Analisis kesesuaian.2024)

Aspek Fisik/Infrastruktur, yaitu perkiraan jenis dan jumlah kerusakan atau perubahan fisik infrastruktur. Selain permukiman penduduk, bagian ini juga merincikan jenis infrastruktur publik vital yang mengalami kerusakan, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan air, fasilitas energi, jaringan komunikasi, tempat ibadah, sarana pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, dan lainnya. Bentuk kerusakan dinilai dalam 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat/hilang. (berikut Contoh Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Bencana Hidrometeorologi)

No	Jenis Kerusakan	Terancam (%)	Keterangan
1	Prasarana jalan dan jembatan	30	Rusak Ringan
2	Kantor Pemerintahan	30	Rusak Ringan
3	Instalasi Listrik	30	Rusak Ringan
4	Telekomunikasi (BTS)	30	Rusak Ringan
5	Prasarana Transportasi Darat	30	Gangguan operasional
6	Prasarana Transportasi Laut	30	Gangguan operasional
7	Prasarana Transportasi Udara	80	Tidak beroperasi
8	Prasarana Ekonomi (Pasar, Toko, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian)	30	Rusak Ringan
9	Penginapan	30	Rusak Ringan
10	Pasar/pertokoan	30	Rusak Ringan

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Analisis kesesuaian.2024)

Contoh Infentarisasi Infrastruktur Jalan

No	No Ruas	Nama Ruas	Pangkal	Ujung
1.	4	Tipar Kidul - Karangbawang	JN. Ajabarang - Wangon (Balai Desa Tipar Kidul)	Jl. Karangbawang - Gumelar
2.	14	Ajabarang - Dharmakradenan	JN. BTS. Brebes/Banyumas - Ajabarang	Jl. Karangbawang - Gumelar
3.	106	Karangbawang - Gumelar	JN. Ajabarang - Wangon (SDN 1 Karangbawang)	Jl. Gumelar - Samudra (SMP 1 Gumelar)
4.	107	Gumelar - Samudra	Jl. Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Kecamatan Gumelar)	BTS. Brebes
5.	109	Gumelar - Tlaga	Jl. Gumelar - Samudra (Tugu Gumelar)	BTS. Cilacap
6.	111	Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar Wage)	Pertigaan Sirongge	Jl. Karangbawang - Gumelar (Pasar Wage Cihonje)
7.	112	Karangkemojing - Cirahab	Jl. Karangbawang - Gumelar (Pertigaan Kr Kemojing - Ojeg)	Jl. Cirahab - Canduk / Wangon - Cirahab (Pertigaan Cirahab)
8.	114	Samudera - Kedungoleng	Jl. Gumelar - Samudera (Perempatan Samudera Kulon)	BTS. Brebes
9.	115	Gumelar - Tlaga (Cipicung)	Jl. Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Kecamatan Pelumbungan)	BTS. Cilacap (Karang Pucung)

Contoh Infentarisasi Infrastruktur Jembatan

No	Nama Jembatan	No Ruas	Nama Ruas	Koordinat	Panjang	Lebar	Jumlah Bentang
1.	Jembatan Dermaji (Sirongge) 2	600	Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Pasar/Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Kecamatan))	-7.378112714,108.9769896	4	4,5	1
2.	Jembatan Dermaji (Sirongge) 1	600	Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Pasar/Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Kecamatan))	-7.383936111,108.9710224	25,8	3,9	3
3.	Jembatan Gumelar V	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.349464,109.01714	16	4,9	1
4.	Jembatan Njarangan	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.351626,109.014005	9,8	6,3	1
5.	Jembatan Gumelar IV	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.35182,109.012183	14,8	4,7	2
6.	Jembatan Gumelar III	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.362045,108.989542	14,2	4,9	2
7.	Jembatan Gumelar II	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.362466,108.988481	7,8	7	1
8.	Jembatan Kali Sompok	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.372476,108.981883	14,8	6,4	2
9.	Jembatan Gumelar VI	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.342166,109.028176	8,2	4,8	1
10.	Jembatan Gumelar I	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.363472576,108.9883239	3,3	6,2	1
11.	Jembatan Kali Kuluh	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.350959,109.015259	8,3	6	1
12.	Jembatan Gumelar I	109	Gumelar - TlagaGumelar - Tlaga	-7.366754997,108.969625	5	4,8	1

Contoh Infentarisasi Infrastruktur Bangunan Sekolah

NO	JENIS SEKOLAH	Gumelar	Lumbir	JUMLAH
1	SEKOLAH DASAR (SD/MI)	32	34	66
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP/MTs)	5	5	10
3	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA/SMK)	3	2	5
4	SEKOLAH LUAR BIASA	0	0	0
5	PESANTREN	15	11	26

(Sumber: DPU Kabupaten Banyumas)

Contoh Infentarisasi Infrastruktur Jaringan Listrik

Jenis Pelanggan (PLN)	Jumlah Listrik yang Disalurkan PT PLN (Persero) Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Banyumas (kWh)					
	ULP Wangon			ULP Ajibarang		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sosial	4.145.456	5.290.467	6.123.353	5.225.840	6.407.375	7.121.479
Rumah Tangga	98.890.145	97.594.279	100.668.310	91.318.499	90.201.576	92.625.390
Bisnis	13.712.057	16.293.740	18.884.848	13.465.810	14.603.569	15.995.019
Industri	15.236.467	18.758.353	24.326.171	145.120.492	142.503.818	130.178.757
Pemerintah/Penerangan Jalan Umum	2.742.365	2.750.617	2.770.989	2.143.970	2.217.889	2.272.558
Traksi/Curah/Layanan Khusus	75.841	88.126	208.870	80.638	146.873	247.091
Jumlah	134.802.331	140.775.583	152.982.541	257.355.249	256.081.100	248.440.294
Catatan: Perbedaan angka disebabkan oleh pembulatan						
Sumber: PT PLN (Persero) UP3 Purwokerto						
Source Url: https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/7/164/1/jumlah-listrik-yang-disalurkan-pt-pln-persero-menurut-jenis-pelanggan-di-kabupaten-banyumas.html						
Access Time: August 11, 2024, 10:18 pm						

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2019 dan Analisis kesesuaian.2024)

Aspek Ekonomi, yaitu perkiraan bentuk-bentuk kehilangan aset dan gangguan fungsi ekonomi yang rusak atau tidak berfungsi.

Desa/Kelurahan	Pasar tanpa Bangunan	Mini Market/ Swalayan/ Supermarket	Restoran/ Rumah Makan	Desa/Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen
(1)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)
1 Cilangkap	-	-	-	1 Cilangkap	-	-	-
2 Cihonje	-	1	-	2 Cihonje	-	-	1
3 Paningkaban	-	4	-	3 Paningkaban	-	-	-
4 Karanglemojing	-	1	-	4 Karanglemojing	-	-	-
5 Gancang	-	-	-	5 Gancang	-	-	-
6 Kedungurang	-	-	-	6 Kedungurang	1	-	1
7 Gumelar	1	4	-	7 Gumelar	-	-	1
8 Tlaga	-	2	-	8 Tlaga	-	-	-
9 Samudra	-	1	-	9 Samudra	-	-	-
10 Samudra Kulon	-	1	-	10 Samudra Kulon	-	-	-
Gumelar	1	14	-	Gumelar	1	-	3

(Sumber: BPS Banyumas dalam Angka, Modul Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2019 dan Analisis kesesuaian.2024)

Aspek Lingkungan, yaitu bentuk kerusakan/gangguan lingkungan hidup, baik kuantitas maupun kualitasnya. Elemen lingkungan, meliputi air, udara, tanah, vegetasi dan lainnya.

Contoh asumsi dampak lingkungan

Data Asumsi Aspek Lingkungan Berpotensi Terdampak Bencana

Longsor menimbulkan rusaknya vegetasi alami pada sebagian besar wilayah, selain tanah kehilangan kesuburan, pemulihan lahan akibat longsor memakan waktu yang cukup lama. Data KRB Kabupaten Banyumas Tahun 2023 menyebutkan kerusakan lingkungan akibat longsor diperkirakan berdampak seluas 11,99 Hektar pada Kecamatan Lumbir dan Kecamatan Gumelar.¹⁷

Aspek Layanan Publik/Pemerintahan, yaitu perkiraan gangguan fungsi layanan publik vital. Layanan publik tersebut meliputi; layanan administrasi pemerintahan desa/kelurahan/daerah, layanan kesehatan, layanan pendidikan, , layanan ibadah dan lainnya.

Contoh Inventarisasi Infrastruktur Jaringan Listrik

NO	JENIS TINGKATAN PEMERINTAHAN	Gumelar	Lumbir	JUMLAH
1	RT	401	333	734
2	RW	81	65	146
3	DUSUN	36	27	63

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2019 dan Analisis kesesuaian.2024)

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

2.1. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana bersifat arahan/pedoman umum, bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut,

Kebijakan	Strategi
Memobilisasi dan menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki daerah untuk penanganan darurat bencana	Membuat nota kesepahaman dengan pihak swasta terkait pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Seperti: adanya SPBU, PLN, PDAM, dan lain-lain khusus untuk pelaku tanggap darurat, pengerahan alat berat dan

Kebijakan	Strategi
	disertai aturan tertulis mengenai tata layanan
	Memobilisasi segenap kekuatan personil, sarana prasarana yang ada pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI-KODIM 0701/Banyumas /Polri-POLRESTA Banyumas, Basarnas, Swasta, Perguruan Tinggi, PMI, dan relawan
	Membuat kesepakatan tertulis/konsensus antar SKPD untuk menjadikan rencana kontingensi menjadi rencana operasi pada saat terjadi bencana
	Menugaskan TRC ke lokasi bencana secara cepat dan akurat serta melaporkan kepada pihak terkait. Baik untuk tingkat provinsi maupun pusat serta berbagai pihak yang membutuhkan untuk penggalangan dukungan bantuan dari luar
	Setiap sektor melaksanakan fungsi koordinasi
	Mengoptimalkan fungsi posko utama dan posko lapangan sebagai lalu lintas pemberian bantuan untuk menghindari duplikasi atau keterabaian
	Mengoptimalkan seluruh instansi / lembaga / masyarakat yang terkait penanggulangan bencana untuk mengerakkan semua sumber daya baik personil

Kebijakan	Strategi
	<p>maupun sarana dan prasarana yang sudah disiapkan sebelumnya untuk di pergunakan</p> <hr/> <p>Mempersiapkan sarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh lokasi bencana</p> <hr/> <p>Memberikan pelayanan keamanan kepada lembaga pemberi bantuan agar selamat sampai tujuan (lokasi bencana)</p> <hr/> <p>Pengerahan relawan yang dikerahkan diharapkan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat dan memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar menghindari tumpang tindih tugas yang tidak efektif</p>
<p>Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar korban dan perlindungan terhadap kelompok rentan</p>	<p>Mengaktifkan Tim Fire and Rescue ke lokasi bencana secara cepat dan akurat, dengan memprioritaskan lansia, anak-anak, pasien rumah sakit, penyandang cacat dan ibu hamil dan melaporkan kepada pihak terkait diperuntukan untuk kelompok rentan</p> <hr/> <p>Mendirikan tenda pengungsi, dapur umum, mck, bak penampungan air bersih dan menyediakan penerangan (generator) diperuntukan untuk kelompok rentan</p>

Kebijakan	Strategi
	<p>Mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan untuk penanggulangan dukungan bantuan dari luar diperuntukan untuk kelompok rentan</p> <hr/> <p>Mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh lokasi bencana</p>
<p>Memastikan semua warga terdampak tertangani dan tercukupi kebutuhan dasarnya</p>	<p>Mengerahkan semua sumber daya dan Potensi yang ada untuk dapat dipergunakan dalam tanggap darurat penanggulangan bencana, dan bersifat partisipasif.</p> <hr/> <p>Pembentukan Posko Penanggulangan Bencana dan Penyediaan Logistik dan fasilitas pengungsian bagi pengungsi, serta pos-pos kesehatan, rumah sakit lapangan di setiap titik pengungsian, menyiapkan obat-obatan, penyediaan darah, dokter dan paramedis.</p> <hr/> <p>Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta tindak lanjut yang direncanakan</p>
<p>Mengoptimalkan manajemen penanganan darurat bencana</p>	<p>Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB)</p> <hr/> <p>Membentuk komando yang berfungsi untuk mempermudah akses pemerintah dalam memberikan</p>

Kebijakan	Strategi
	bantuan/kebutuhan daerah nantinya
	Pembuatan pos bantuan
	Mengoptimalkan manajemen data dan informasi dalam hal pencatatan bantuan yang diterima dan dikeluarkan (diberikan) kepada korban
	Merealisasikan prosedur tetap penanggulangan bencana Hidrometeorologi
	Merealisasikan rencana kontijensi menjadi rencana operasi penanggulangan bencana Hidrometeorologi
	Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian serta analisis dan evakuasi terhadap kegiatan penanganan darurat
	Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak bencana Hidrometeorologi
	Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan
	Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi
	Pengobatan gratis bagi korban bencana dan Psychological <i>First Aid</i>

Kebijakan	Strategi
	<p>Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana</p> <hr/> <p>Keluar masuk informasi (data harus melalui satu pintu dari posko utama dan memanfaatkan informasi dan komunikasi baik lokal, nasional maupun internasional)</p> <hr/> <p>Melakukan pengawasan dan pengendalian, analisa serta evaluasi terhadap setiap kegiatan penanganan darurat</p> <hr/> <p>Memanfaatkan sistem dan manajemen informasi dan komunikasi. Baik tingkat lokal, nasional dan internasional</p> <hr/> <p>Mengadakan kerjasama/MoU dengan lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah</p> <hr/> <p>Memberi kemudahan akses terhadap penyaluran bantuan tanggap darurat dari negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Memastikan tidak munculnya risiko lanjutan</p>	<p>Berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana, dan terus memantau informasi terkini.</p> <hr/> <p>Warning system atau teknologi peringatan bencana Hidrometeorologi dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang berisiko</p>

Kebijakan	Strategi
	<p>akan longsor di daerah-daerah longsor. Peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana, maupun bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk membuat inovasi - inovasi baru.</p> <p>Membagi daerah kab/kota yang terkena dampak bencana berdasarkan zona-zona yang diidentifikasi berdasarkan keadaan geografis wilayah (jarak dan luas wilayah tersebut)</p> <p>Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana disemua sektor</p>
Memastikan keberlanjutan proses pendidikan	Segera mendata anak-anak dalam usia sekolah untuk di berikan pendidikan di posko darurat.
Meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik serta memastikan bahwa para korban bebas dari tindakan diskriminasi	Mendata seluruh warga yang mengungsi dan memastikan semua warga mendapat perlakuan yang sama.
Memastikan semua korban manusia, dapat segera di tolong, bagi korban yang luka-luka diberikan pengobatan, sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan.	Melakukan kegiatan mengurus para korban bencana dengan kegiatan evakuasi, penyelamatan korban luka-luka, dan pelayanan kesehatan
Meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik serta memastikan bahwa para korban bebas dari tindakan diskriminasi	Mendata seluruh warga yang mengungsi dan memastikan semua warga mendapat perlakuan yang sama.

Kebijakan	Strategi
<p>Memastikan semua korban manusia, dapat segera di tolong, bagi korban yang luka-luka diberikan pengobatan, sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan.</p>	<p>Menerapkan prinsip-prinsip kerja operasi penanggulangan kedaruratan dalam operasi penanganan bencana</p> <p>Melakukan kegiatan mengurus para korban bencana dengan kegiatan evakuasi, penyelamatan korban luka-luka, dan pelayanan kesehatan</p> <p>Melaksanakan kegiatan mengurus para pengungsi korban bencana dengan kegiatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, hunian sementara, dan MCK serta air bersih</p>
<p>Memastikan inventarisasi dan penyelamatan aset penting negara.</p>	<p>Mengarahkan kepada tim forum PRB untuk menyelamatkan asset penting Negara dan menunjuk salah satu orang sebagai penanggung jawab.</p>
<p>Penataan ruang dan kawasan untuk pencegahan alih fungsi yang tidak tepat</p>	<p>Menghindari pembangunan pemukiman di daerah dibawah lereng yang rawan terjadi Hidrometeorologi, dan atau lokasi yang sangat berdekatan dengan radius yang sangat dekat dengan risiko kejadian berulang</p> <p>Mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng</p> <p>Menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng secara langsung, dan tanpa disertai drainase maupun</p>

Kebijakan	Strategi
	<p>talut untuk mencegah penggerusan tanah oleh air hujan</p> <hr/> <p>Pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor</p> <hr/> <p>Menghindari membangun rumah di bawah tebing dan di tepi sungai yang rawan akan bencana erosi</p> <hr/> <p>Relokasi daerah rawan Hidrometeorologi, meskipun butuh dana besar ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar.</p>
<p>Pemulihan kawasan rawan dengan intervensi alami</p>	<p>Penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat diantaranya di seling-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air</p> <hr/> <p>Menghentikan penebangan pohon penahan lereng</p> <hr/> <p>Penggantian tanaman produksi berkayu keras seperti tanaman hortikultura untuk mendapatkan dua keuntungan</p> <hr/> <p>Perbaikan dan pemulihan biodeservasi alami yang ada</p>
<p>Edukasi dan Peringatan dini Terhadap Bahaya Longsor</p>	<p>Masivikasi rambu dan penanda peringatan bahaya Hidrometeorologi di wilayah yang memiliki potensi bahaya</p>

Kebijakan	Strategi
	<p>Membentuk team FPRB sebagai ujung tombak distribusi informasi dan KIE</p> <hr/> <p>Mengurangi kecemasan masyarakat terhadap isu-isu ancaman bencana yang akan terjadi</p>
<p>Perbaikan sarpras vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan diwilayah terdampak bencana,</p>	<p>Pendaya dan pengupayaan stabilitas pelayanan public tetap terjaga</p> <hr/> <p>Rekonstruksi ulang gedung pelayanan dan sapras vital di wilayah aman dan dapat dijangkau</p>
<p>Dana swadaya peruntukan Alat berat dan alat evakuasi kedaruratan</p>	<p>Membuat pos anggaran khusus untuk oprasional pengerahan alat berat</p> <hr/> <p>Kerjasama pengadaan alat berat peruntukan evakuasi dan penyelamatan berbasis swadaya masyarakat</p>

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2019 dan Analisis kesesuaian.2024)

BAB III
MEKANISME

3.1. Identifikasi Peran Pemangku Pemerintahan dan Non Pemerintahan
Tabel 25.3. Matriks Identifikasi Pemangku Kepentingan

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
SAAT BENCANA	OPD	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana; 2. Pemantauan informasi kebencanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis lingkup bencana; 2. Analisis jumlah korban. 3. Aktifasi team JITUPASNA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kebutuhan pasca bencana; 2. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan barak pengungsian (shelter); 2. Menyiapkan logistik dan dapur umum; 3. Mempersiapkan sandang dan cadangan sementara kebutuhan dasar hidup (selimut, dsb) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola barak penampungan (shelter); 2. Mengelola logistik dan dapur umum. 3. Menghimpun pendanaan lintas sektoral. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan penyintas; 2. Pemulihan psikososial penyintas; 3. Penyiapan rumah singgah (transisi) 4. Pendampingan persiapan hidup layak dan sejahtera paskabencana;

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM	Penyiapan peralatan dan alat berat untuk penanganan darurat	Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana.	Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air, dan kebutuhan fisik dasar lainnya.
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memetakan upaya mengevakuasi korban bencana 2. Memberikan rekomendasi aman tempat, sarana, dan fisik untuk korban bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tempat pengungsian terpadu 2. Memberikan edukasi dasar tentang pemanfaatan fasilitas darurat 3. Membangun sarana kebutuhan dasar seperti akses air, K-MCK, jaringan limbah, dan lokasi penguburan masal apabila 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan hunian sementara 2. Perencanaan FS rumah bagi korban bencana 3. Persiapan pendistribusian rumah korban bencana

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
				terjadi ledakan korban yang tak terkendali	
		PDAM		Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih
		RSUD DAN PUSKESMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat 2. Melakukan update kapasitas nakes tanggap darurat 3. Koordinasi dan komunikasi dengan BPBD untuk pegerahan dan pendistribusian bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelayanan kesehatan darurat 5. Penyiapan alokasi maupun tempat penyelamatan untuk kondisi korban gawat darurat 6. Pengerahan ambulan dan team evakuasi kesehatan 7. Distrubusi bahan kesehatan atau alat pendukung 	Pelayanan kesehatan

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
				kesehatan untuk korban	
		DINAS KESEHATAN	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan Penyelenggaraan layanan psikososial dasar 2. Memeberikan bantuan darurat peananganan dan penyelamatan darurat 3. Memberikan bantuan hidup dasar pada korban bencana 4. Melakukan tresing dan code blue pada korban bencana 5. Melakukan penyelamatan dan evakuasi 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemulihan psikososial dasar 7. Pemenuhan gizi bagi anak anak 8. Pemenuhan gizi bagi lansia 9. Pemenuhan gizi bagi orang sakit 10. Pemenuhan vitamin dan daya tahan tubuh pada korban bencana

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
				korban bencana berat	
		DINAS PENDIDIKAN	Penyiapan pendidikan darurat	Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana; Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana; Dst.	Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyiapan peralatan komunikasi	Perbaikan jaringan telekomunikasi	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyiapan antisipasi lonjakan harga dan inflasi	Pengaturan nilai standar jual harga dan kebutuhan kedaruratan (stabilitas harga utamanya kebutuhan dasar dan perlengkapan pendukung primer saat dan setelah bencana).	

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
		DINAS PERHUBUNGAN	Pengaturan lalu lintas saat bencana	Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu	
		SATPOL PP DAN DAMKAR	Penegakan trantibum Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman	Mengoptimalkan pengamanan aset-aset pemerintah Melaksanakan SAR Pemadaman Kebakaran	Pengamanan aset pemerintah; Penegakan hukum
	TNI/POLRI	Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan; Penegakan hukum ; dst.	Pengamanan aset penghidupan korban bencana; Pencarian penyelamatan, pertolongan darurat; dst.	Pemulihan keamanan dan ketertiban	
	Instansi Vertikal	BASARNAS	Penyiapan peralatan dan petugas	Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Dukungan peralatan
		PLN	Survey jaringan listrik	Perbaikan jaringan listrik Penyediaan	Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
				energi listrik cadangan	
	Organisasi Masyarakat	NGO/LSM/PMI/ORGANISASI KEAGAMAAN/PRAMUKA/DUNIA USAHA/DSB	Penyiapan peralatan dan petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat; 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi; 3. Pelayanan kesehatan; 4. Pelayanan psikososial; 5. Membantu dalam pencarian korban bencana; 6. Pendirian tenda darurat; 7. Pembuatan tenda dapur darurat; 8. Mengaktifkan saluran penyebaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi; 2. Pelayanan kesehatan lansia, anak-anak dan orang sakit; 3. Pelayanan Logistik; 4. Pelayanan psikososial. 5. Penilaian kerusakan.

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
				peringatan untuk mencapai kelompok sasaran. 9. Memastikan sanitasi dan kebersihan	

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
			REHABILITASI	REKONSTRUKSI
TRANSISI DARURAT DAN PASKA BENCANA	OPD	BPBD	1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi; 2. Pemulihan sosial dan ekonomi; 3. dst.	1. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 2. Peningkatan sosial dan ekonomi 3. dst.
		BAPPEDA	1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Review perencanaan pembangunan	
		DINAS PEKERJAAN UMUM	1. Perbaiki lingkungan daerah bencana; 2. Perbaiki sarana dan prasarana umum	Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
			REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan hunian sementara; 2. dst. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki hunian; 2. Pembangunan hunian tetap
		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak; 2. Pemberian bantuan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana sosial masyarakat; 2. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat; 3. dst.
		DINAS KESEHATAN	Perbaiki pusat layanan kesehatan	Pembangunan pusat layanan kesehatan
		DINAS PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pendidikan darurat; 2. Perbaiki sekolah 	Pembangunan fasilitas layanan pendidikan
		SATPOL PP DAN DAMKAR	Pemulihan keamanan dan ketertiban umum	
		DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Perbaiki infrastruktur pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
			REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		DINAS PERHUBUNGAN	Pemulihan pelayanan transportasi umum	Perbaiki pelayanan transportasi umum
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemulihan perekonomian masyarakat dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana vital UKM, seperti pasar maupun lokasi jual beli utama; 2. Pendampingan pengembangan ekonomi UKM dengan pendampingan modal. 3. Membangun sistem dan mekanisme darurat transaksi; 4. Pengaturan nilai standar jual harga dan kebutuhan kedaruratan (stabilitas harga utamanya kebutuhan dasar dan perlengkapan pendukung primer saat dan setelah bencana).
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM		
		TNI/POLRI, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan perekonomian masyarakat; 2. Penyediaan hunian sementara; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perekonomian; 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik; 3. Peningkatan perekonomian;

TAHAPAN	KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
			REHABILITASI	REKONSTRUKSI
			3. Pemulihan perekonomian masyarakat; 4. Penyediaan hunian sementara	4. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

(Sumber: Data Identifikasi dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2028, Modul Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2019 dan Analisis kesesuaian.2024)

Tabel 26.3. Matriks Peran dan Mandat BPBD

STASE BENCANA	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
SAAT BENCANA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana; ▪ Mengkoordinasikan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan Pos Siaga Bencana; ▪ Memberikan arahan kepada Posko Penanggulangan Bencana dalam menyusun / melaksanakan kebijakan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan Bencana; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan status/ Tingkat Bencana oleh Kepala Daerah (dalam hal ini Bupati Banyumas); ▪ Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.; ▪ Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	BUPATI, ORGANISASI TANGGAP DARURAT BENCANA, PERANGKAT DAERAH, RELAWAN, TNI, POLRI, LSM, NGO, ORMAS MDMC LPBI NU MPBI, PKPU, DOMPET DHUAFA, PLN, PDAM, DUNIA USAHA

STASE BENCAN A	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan poso Penanggulangan Bencana; ▪ Penyediaan logistic dan pemenuhan hak dasar korban bencana; ▪ Menerima laporan atas terjadinya bencana alam yang berdampak pada kerusakan jalan dan jembatan ▪ Melaksanakan tugas-tugas yang relevan yang tidak dilaksanakan oleh lembaga lain; ▪ Melaporkan kepada Bupati Banyumas dan Gubernur Jawa tengah juga BNPB; ▪ Memonitor dan membantu agar kondisi jalan dan jembatan dapat dilalui dengan aman setelah terjadinya bencana; ▪ Berkoordinasi dan bersama Balai Besar terkait / Organisasi Vertikal (BMKG)/ESDM/PVMBG 	<ul style="list-style-type: none"> instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat; ▪ Meresmikan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana. ▪ Menyediakan fasilitas untuk mendukung operasi komando: lokasi, media center, dll; ▪ Mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistic dari badan-badan yang berpartisipasi dan bekerja dalam koordinasi dengan BPBD Provinsi dan/atau BNPB, mis Tim Kaji Cepat dan/atau Tim 		

STASE BENCAN A	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
	<p>memfasilitasi Satker (satuan kerja) / PPK / Petugas Lapangan agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana alam sesuai prioritas, akurat, dan cepat;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan; ▪ Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif; ▪ Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan pananganannya kepada media massa dan masyarakat luas; ▪ Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi 	<p>Reaksi Cepat (TRC), tim penyelamat;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuka pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan Pos Lapangan sesuai keperluan; ▪ Menghimpun, mencatat, memantau, dan mengevaluasi kejadian bencana alam serta dampak yang ditimbulkannya; ▪ Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten/Kota/P 		

STASE BENCAN A	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
	yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.	rovinsi atau BNPB, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.		
TRANSISI DARURAT DAN PASKA BENCAN A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Tanggap Darurat Bencana; ▪ Pelaporan terkait penanganan darurat bencana; ▪ Relokasi dan pengorganisasian pembagian hunian kepada korban bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengakhiri operasi penanganan darurat bencana bila kondisinya memungkinkan: tidak ada lagi ancaman terhadap kehidupan, transisi ke fase pemulihan, dan tidak ada potensi kerugian lebih lanjut; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ; ▪ Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; ▪ Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; ▪ Pemantauan, evaluasi dan 	BUPATI, ORGANISASI TANGGAP DARURAT BENCANA, PERANGKAT DAERAH, RELAWAN, TNI, POLRI, LSM, NGO, ORMAS MDMC LPBI NU MPBI, PKPU, DOMPET DHUAFa, PLN, PDAM, DUNIA USAHA

STASE BENCAN A	KOORDINASI	KOMANDO	DUKUNGAN IMPLEMENTASI	PELAKSANA
			analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;	

(Sumber: Data Identifikasi dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2028, Modul Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2019 dan Analisis kesesuaian.2024)

3.2. Konsep Operasi

Konsep Operasi Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi akibat peningkatan curah hujan melaksanakan operasi tanggap darurat SKPDB (Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana) Hidrometeorologi di Kabupaten Banyumas adalah dalam rangka melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana Hidrometeorologi, mulai hari “H” jam “J” selama 7 (tujuh) hari, di 27 wilayah Kecamatan dan 30 kelurahan dan 301 Desa terdampak dengan pengerahan sumberdaya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat Kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional.

Operasi penanganan darurat bencana dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap/fase, dan satu fase tambahan yaitu fase siaga darurat - tanggap darurat bencana, penetapan status tanggap darurat, dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana.

Fase	Sasaran Tindakan
Siaga Darurat	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="500 1024 1448 1226">1. Memantau rilis peringatan dini Gerakan Tanah/Gempa/Curah Hujan Lebat/Sesaran Tanah/Longsor dari organisasi vertical (seperti ESDM, STALKIM BMKG Jawa Tengah atau PVMBG secara real-time);<li data-bbox="500 1234 1448 1402">2. Menyiapkan dan menyiagakan personel sesuai dengan komponen dalam organisasi dan tugas penanganan darurat bencana longsor di bawah koordinasi BPBD Kabupaten Banyumas; (Utamanya TRC)<li data-bbox="500 1411 1448 1486">3. Menyampaikan update informasi potensi Longsor dan bencana sekunder kepada Bupati;<li data-bbox="500 1495 1448 1570">4. Terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Longsor;<li data-bbox="500 1579 1448 1747">5. Menyiagakan dan menguji alat peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi terpadu agar dapat terhubung dengan semua pihak terkait baik di daerah hingga pusat melalui kegiatan apel siaga;<li data-bbox="500 1755 1448 1831">6. Menyiagakan peralatan evakuasi longsor, merencanakan tempat evakuasi sementara (TES) dan menentukan

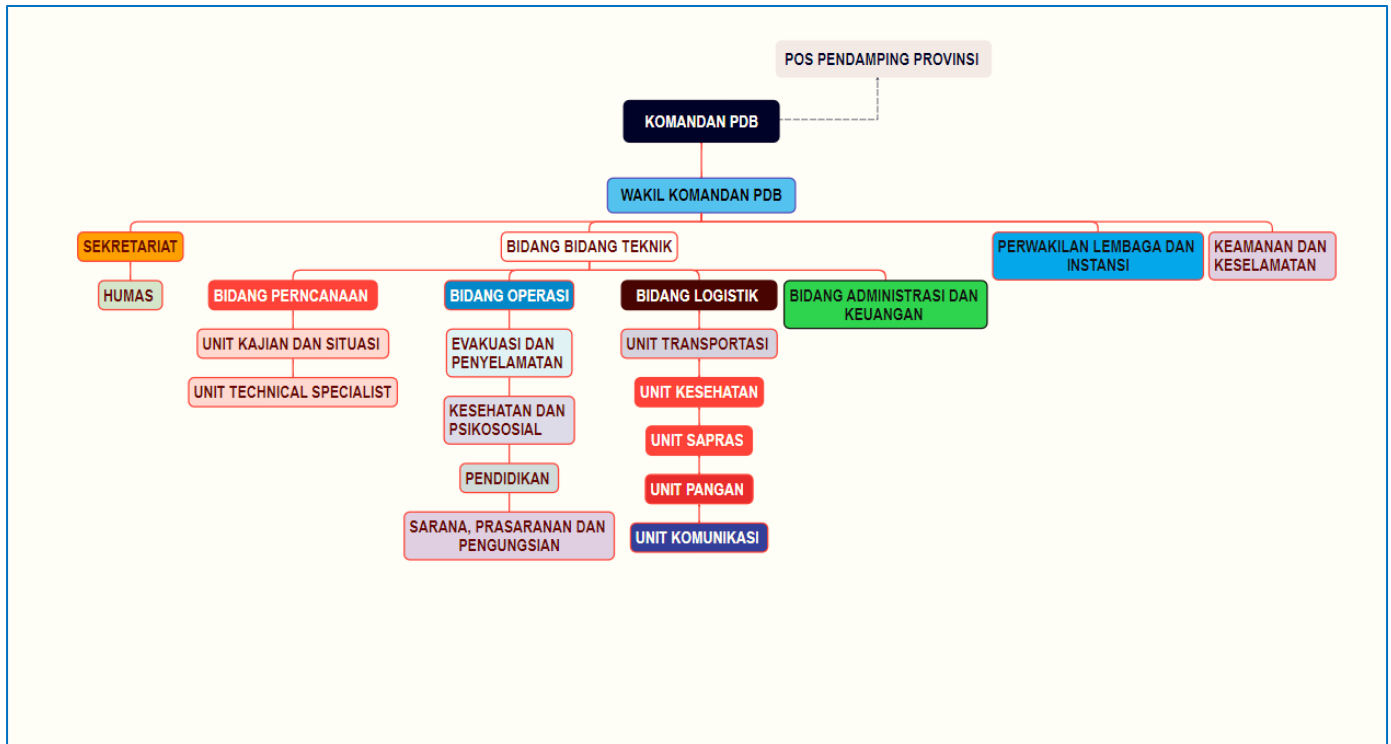
Fase	Sasaran Tindakan
	<p>tempat evakuasi akhir (TEA) di lokasi aman yang mudah dijangkau;</p> <p>7. Mengaktifkan posko lapangan longsor di daerah yang memiliki ancaman longsor.</p>
<p>Penetapan Status Keadaan Darurat²</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data dan Informasi ancaman atau kejadian bencana beserta faktor-faktor yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui team pengkaji cepat multi sektoral maupun kegiatan pengkajian cepat SKPDB. 2. Menggelar Koordinasi dan komunikasi dengan lembaga dan instansi untuk membentuk rekomendasi penetapan status darurat bencana. Hasil dalam rekomendasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila hasil rapat koordinasi menunjukkan belum ada atau keadaan atau situasi belum memenuhi kriteria, maka selanjutnya dapat dinyatakan keadaan tidak darurat bencana. b. Sebaliknya, apabila hasil rapat koordinasi dan komunikasi menunjukkan situasi/keadaan memenuhi kriteria darurat bencana, maka dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana.
<p>Tanggap Darurat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasi; 2. Mobilisasi sumber daya: personel, peralatan, logistik, untuk pendukung; 3. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana longsor tingkat Kabupaten; 4. Pembentukan Pos Lapangan ; 5. Mendorong aktivasi satuan komando penanganan darurat bencana (SKPDB) longsor di 2 kecamatan terdampak; 6. Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) penanganan darurat bencana longsor di Kabupaten; 7. Membuka wilayah yang terisolasi guna memperlancar kegiatan <i>rescue</i> (penyelamatan) dan distribusi bantuan;

² Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.BNPB Tahun 2016 (Merujuk pada perencanaan Rencana Kontingensi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-Asistensi dengan Bidang PK Provinsi Jawa Tengah Pada Tanggal 09 Agustus 2024 si BPBD Provinsi Jawa Tengah)

Fase	Sasaran Tindakan
	<ol style="list-style-type: none"> 8. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban terdampak bencana dan harta benda; 9. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada masa kebencanaan; 10. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita hamil, anak, lansia serta penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan); 11. Melakukan update informasi terkait dampak dan penanganan bencana;
Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan; 2. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan; 3. Mendukung pemulihan dan keberfungsian sarana - prasarana layanan publik; 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang; 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang; 6. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat; 7. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi; 8. Demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir atau perpanjangan tugas personel jika operasi diperpanjang; 9. Mengakhiri status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi;

(Sumber Modul Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2019 -BNPB-Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

3.3. Fungsi



(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Renkon 5.0-BNPB dan Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD.2024)

Gambar 10.4. Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Hidrometeorologi Kabupaten Banyumas

Fungsi BPBD Kabupaten Banyumas dalam kedaruratan memiliki tugas pokok pendukung dan pendampingan kepada SKPDB 2 Kecamatan terdampak bencana Hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten Banyumas membentuk komando sebagai sistem dengan bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik. Fungsi pokok diantaranya

- (a) Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi Dan Informasi;
- (b) Perencanaan;
- (c) Operasi;
- (d) Logistik;
- (e) Administrasi dan Keuangan.

Fungsi masing-masing bidang pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana sebagai berikut:

Tabel 27.4. Fungsi dan Kegiatan Pokok Kabupaten Banyumas dalam Darurat Bencana Hidrometeorologi

Tindakan	Kegiatan Pokok
Tindakan 1: Melaksanakan Tindakan Komando, Kendali Koordinasi, Komunikasi,	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Hidrometeorologi; b. Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Hidrometeorologi; c. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu parapihak;
Tindakan 2: Melaksanakan Perencanaan Penanganan Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana Hidrometeorologi secara terpadu; b. Memastikan adanya proses perencanaan terpadu dalam penanganan darurat Hidrometeorologi, berdasarkan prioritas dan tujuan yang ditentukan; c. Mendukung dan memantau penyusunan strategi pemulihan pasca darurat bencana Hidrometeorologi.
Tindakan 3 : Operasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana; b. Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat; c. Mendukung dan mengkoordinasikan semua operasi taktis di lapangan; d. Memantau dan mendukung penyelesaian tujuan operasi tanggap darurat bencana.
Tindakan 4: Pemenuhan Logistik untuk penanganan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis dan kesehatan, fasilitas akses kemudahan kelompok rentan, dsb)

Tindakan	Kegiatan Pokok
Darurat Bencana Hidrometeorologi	yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan; b. Mendukung pemenuhan layanan medis dan kesehatan, makanan dan fasilitasi peralatan yang diperlukan dalam operasi tanggap darurat.
Tindakan 5: Pelayanan Administrasi dan Keuangan untuk penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi	a. Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana; b. Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana; c. Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri, swasta dan masyarakat sesuai peraturan yang ada.

(Sumber Modul Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2019 -BNPB-Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

3.4. Tugas-tugas

Pencapaian dalam sasaran penanganan bencana, fungsi diturunkan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bidang bersama bagian/unit divisi di bawahnya. Agar pelaksanaan dapat terealisasi, oleh karenanya tugas di susun berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Berikut merupakan penjabaran tugas masing-masing bidang dalam penanganan kedaruratan bencana Hidrometeorologi.

Tabel 28.4. Tugas-Tugas Bidang

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	Memimpin koordinasi internal dan bertanggung jawab pada proses	Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	a. Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana b. Menyiapkan posko PDB di Kabupaten

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
	penanganan darurat bencana		<p>terdampak Bencana Hidrometeorologi</p> <p>c. Mengkoordinasikan kesiapan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, pelayanan kesehatan dan penyelamatan</p> <p>d. Memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/orga nisasi terlibat dalam fasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana</p>
		Wakil Komandan PDB	<p>a. Mendampingi komandan PDB dalam pelaksanaan tugas darurat bencana</p> <p>b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga</p> <p>c. Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan</p>
		Pos Pendamping Nasional	Berkordinasi dengan POSKO PDB tanah terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
			dengan analisis situasi yang ada
		Sekretariat	Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda komandan PDB
		Perwakilan Institusi/Lembaga	Membantu komandan untuk memastikan dukungan sumber daya dari instansi dan lembaga terkait di tingkat Kabupaten Banyumas
		Keselamatan dan keamanan	Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan lingkungan posko PDB dan Pengungsian
2. Bidang Perencanaan	Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana tanah dan Memastikan komando dan rantai komunikasi berjalan baik operasi	Unit Kajian Situasi	<p>a. Melakukan pemantauan terhadap Potensi Bencana Hidrometeorologi yang dirilis oleh STALKIM BMKG dan PVMBG maupun EWS yang terpasang sepanjang radius wilayah rawan bencana</p> <p>b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten penanganan darurat</p>

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
	pelaksanaan darurat bencana		bencana Hidrometeorologi c. Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana tanah longor a. Mengkoordinasikan hasil evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat dari wilayah terdampak
		Unit <i>Technical Specialist</i>	b. Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penanganan darurat Bencana Hidrometeorologi yang membutuhkan keahlian khusus
3.Bidang Operasi	a. Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana; b. Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat	Evakuasi dan Penyelamatan	a. Melakukan koordinasi pelaku evakuasi dan penyelamatan b. Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban terdampak bencana c. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi personil pelaku evakuasi dan penyelamatan d. Mendukung dan memastikan terpenuhinya kebutuhan peralatan operasi dan peralatan pendukung lainnya bagi pelaku

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
	bencana secara terpadu dan tepat.		evakuasi dan penyelamatan e. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi evakuasi dan penyelamatan.
		Kesehatan dan Psikososial	a. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi tenaga kesehatan yang berasal dari instansi/Lembaga terkait di Kabupaten Banyumas. b. Memberikan dukungan layanan kesehatan dan psikososial bagi Masyarakat terdampak c. Mengkoordinasikan dan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan (Ibu hamil, balita, lansia, dan disabilitas)
		Pendidikan	a. Mendukung kabupaten terdampak agar Pendidikan tetap terlaksana di tenda pengungsian b. Mendukung kekurangan kebutuhan terkait bidang Pendidikan bagi Masyarakat terdampak bencana
4.Bidang Logistik	Menyediakan dan	Unit Transportasi	a. Mendata kekurangan kebutuhan armada

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
	memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis dan kesehatan, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.		<p>transportasi yang dibutuhkan dalam evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana</p> <p>b. Menyiapkan armada transportasi untuk membackup kekurangan armada kabupaten terdampak bencana</p> <p>c. Menyiapkan sarana transportasi untuk layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak</p> <p>d. Memfasilitasi bantuan penyediaan energi (BBM, LPG dan Listrik)</p>
		Unit Kesehatan	<p>a. Mendukung kekurangan peralatan medis, obat-obatan, vitamin bagi kabupaten terdampak</p> <p>b. Mengkoordinasikan pembagian logistik dengan dinas terkait di kabupaten</p> <p>c. Menyediakan peralatan medis, obat-obatan di pos pengungsian</p>
		Unit Sarpras dan Peralatan	<p>a. Mendukung dalam bentuk sumberdaya manusia dan peralatan dalam penyiapan akses ke daerah terdampak</p>

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> b. Mendukung peralatan dan media komunikasi pos komando selama masa tanggap darurat c. Mengirimkan dukungan peralatan tim operasi tanggap darurat bencana d. Mendukung perbaikan sarana prasarana krusial bagi masyarakat terdampak bencana guna mempermudah penyaluran bantuan e. Mendukung penyiapan dan pendirian posko pengungsian dan dapur umum bagi korban terdampak bencana
		Unit Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung pemenuhan kebutuhan pangan untuk pengungsi korban terdampak bencana b. Mengkoordinasikan dengan kabupaten terdampak terkait penyaluran bantuan pangan
5.Bidang Administrasi dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana; b. Memberikan petunjuk 	Unit Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas Lembaga selama operasi tanggap darurat b. Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
	terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukungan dan pendampingan penanganan darurat bencana; c. Memfasilitasi mekanisme pendukungan dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.	Unit Keuangan	c. Mempersiapkan administrasi meliputi: - Catatan penerimaan - Catatan pengeluaran d. Laporan pertanggungjawaban a. Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT); b. Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak; c. Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat; d. Menyusun laporan keuangan.

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Renkon 5.0-BNPB dan Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD.2024)

3.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi berdasarkan SK Bupati Banyumas tentang penetapan STATUS DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI, ditindaklanjuti dengan aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi. Seluruh pihak yang terlibat dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana

(SKPDB) agar segera melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk:

1. Mengaktifkan Renkon menjadi Renops, menyesuaikan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi
2. Mengaktifkan system komunikasi informasi dan pelaporan di Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat
3. Menginventarisasi semua sumber daya yang tersedia
4. Mobilisasi semua sumber daya yang tersedia
5. Penentuan masa tanggap darurat selama 7 hari
6. Memprioritaskan penanganan pada kelompok rentan
7. Menginstruksikan perbaikan sarana vital segera

Berikut ini langkah-langkah untuk mendukung instruksi dan koordinasi, antara lain:

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Banyumas, BPBD Kabupaten Banyumas melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana Hidrometeorologi. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan.

Lingkup kaji cepat meliputi:

Apa	:	Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Banyumas
Kapan dan Bilamana	:	Sabtu, 3 Agustus 2024 jam 23.00 WIB (waktu setempat) berkemungkinan menghantam permukiman di samping lereng terjal berpotensi banyak korban jiwa terdampak.
Dimana	:	Desa di Kabupaten Banyumas
Berapa	:	Korban jiwa diperkirakan hilang 22 orang, meninggal 11 orang, kondisi baik korban terdampak bencana 882 orang, kondisi korban parah sedang 165 orang dan luka luka berat 22 orang
Penyebab	:	Curah hujan tinggi 1 minggu terakhir

Bagaimana	: Telah dilakukan evakuasi dan pencairan korban hilang, selain telah mengungsikan sebagian besar korban terdampak bencana dan menangani korban yang mengalami luka luka ringan, sedang dan parah. Korban luka luka parah telah dilarikan ke Faskes terdekat untuk mendapatkan pertolongan intensive.
-----------	--

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Renkon 5.0-BNPP dan Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD.2024)

2. Penetapan Status/Tingkat Bencana

Bupati Banyumas menetapkan Status Darurat Bencana Kabupaten Banyumas dengan mengindahkan surat rekomendasi dari STALKIM BMKG, PVMBG, maupun EWS (terpasang dan aktif) perihal kenaikan status dan ancaman longsor dengan pencetus cuaca ekstrem (curah hujan) di Kabupaten Banyumas. Berikut beberapa pertimbangan dalam penetapan status:

- a) Laporan BPBD Kabupaten Banyumas atas hasil pengkajian cepat akibat bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Banyumas
- b) Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi
- c) Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Banyumas
 - Surat Keputusan Bupati sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana
 - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Banyumas dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana Hidrometeorologi.
 - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten merupakan pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Sistem Komando

Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Banyumas dan Pos Komando Kabupaten Banyumas

- Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan penggunaan alokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk penanganan kedaruratan bencana
3. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.
 4. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Banyumas meliputi:
 - a) Pengalokasian sumberdaya Kabupaten Banyumas
 - b) Aktivasi Pos Lapangan
 - c) Aktivasi Jaringan Komunikasi
 5. Pengorganisasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Banyumas.

BAB IV

KOMANDO, KENDALI, DAN KOMUNIKASI

4.1. KOMANDO

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor dipimpin Bupati/Wakil Bupati dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Banyumas. Ketika terjadi status penanganan darurat bencana diikuti dengan pendirian Posko Komando Kabupaten, Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB dan Pos Pendamping Provinsi. Apabila pemerintah kabupaten tidak mampu menangani keadaan darurat bencana, maka kepala daerah akan mengajukan peningkatan status bencana menjadi darurat provinsi. Dalam hal ini Pos Komando Kabupaten akan menjalankan fungsi sebagai Pos Lapangan, sementara Pos Pendamping Provinsi akan beralih menjadi Pos Komando. Dalam dokumen ini Pos Komando telah beralih ke tingkat provinsi.

a. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di Pendopo Sipanji (Kabupaten Banyumas)

Pendopo Sipanji Purwokerto
 Jl. Masjid No.8a, Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto
 Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115
 Koordinat: -7.4232293 LS, 109.230285 BT

(Sumber: Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

b. Pos Lapangan PDB

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kecamatan

Contoh Pos Lapangan PDB		
Kecamatan	Pos Lapangan	Koordinat
Gumelar	Kantor Kecamatan Lumbir,	-7.4266591,109.021544
	Butulan, Lumbir, Banyumas Regency, Central Java 53177	-7.430847,108.9007658
Lumbir	Kantor Kecamatan Gumelar, Jalan Raya, Gumelar, Banyumas Regency, Central Java 53165	-7.4266591,109.0215444 -7.3972115,108.9604264

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Renkon 5.0-BNPB dan Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD.2024)

c. Pos Pendamping

Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Kabupaten Banyumas dan/atau Pos Pendamping BPBD Provinsi Jawa Tengah (sesuai kebutuhan) berfungsi untuk mendukung dan mendampingi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penanganan kedaruratan bencana tanah longsor dan berfungsi untuk memperlancar akses masuk, keluar dan mobilisasi/distribusi bantuan

penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Pos Pendamping berada di BPBD Kabupaten Banyumas.

Pos Pendamping	Lokasi	Koordinat
Kantor BPBD Kabupaten Banyumas	Jl. HM Bahrn, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53146	7° 26' 3.1" LS, 109° 15' 49" BT

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Renkon 5.0-BNPB dan Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD.2024)

d. Pos Pendukung Logistik

Pos Pendukung Logistik Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi untuk memperlancar akses masuk, keluar, serta mobilisasi atau distribusi bantuan penanganan darurat bencana baik dalam maupun luar negeri.

No	Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
1	Pos Logistik 1	Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	-7.457898402671063, 109.41245018900874
2	Pos Logistik 2	Bandara Tunggul Wulung Cilacap	-7.642046362942644, 109.03500052808404
3	Pos Logistik 3	Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang	-6.965902350616222, 110.37498673687293
4	Pos Logistik 4	Bandara YIA Yogyakarta	-7.897239, 110.060616
5	Pos Logistik 5	Terminal Bulupitu	-7.443321007565341, 109.2564107117363
6	Pos Logistik 6	Stasiun Purwokerto	-7.418982895858915, 109.22180595200041
7	Pos Logistik 7	Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap	-7.732186519249057, 108.99533119748575
8	Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	-7.423074036372519, 109.22613069307585
9	Pos Logistik Kesehatan	Puskesmas Lumbir	-7.4438304, 108.9532265 108.9558014
10	Pos Logistik Kesehatan	Pusat Kesehatan Desa Cidora	-7.5040211, 108.977466
11	Pos Logistik Kesehatan	Puskesmas Gumelar	-7.3739627, 108.9787751 108.98135
12	Pos Logistik Kesehatan	Poliklinik Kesehatan Desa Karangemojing	-7.4349237, 109.0062411
13	Pos Logistik Kesehatan	Puskesmas Pembantu Kedungurang	-7.3946781, 109.0207771

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Renkon 5.0-BNPB dan Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD.2024)

4.2. KENDALI

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana tanah longsor berada pada Komandan PDB. Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dan operasi penangaann darurat bencana

4.3. KOORDINASI

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB Kabupaten dan SKPDB Kecamatan bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat, 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

4.4. KOMUNIKASI

a. Radio

- Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB Provinsi

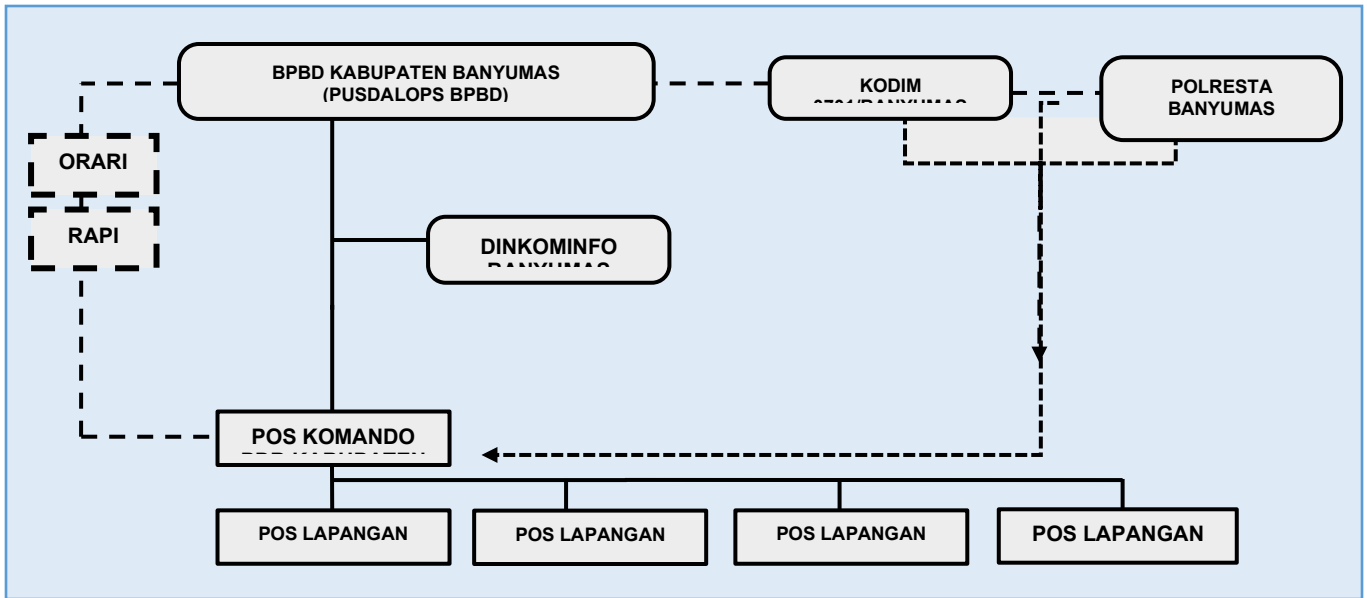
- Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 169.525 MHz untuk TX dengan Tone TX 164.415 Tone 118.8. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD Provinsi.

b. Telepon : 081548808886

c. Email : bpbdbanyumas@yahoo.com

d. Fax : 0281-6841931



Gambar 11.4. Jaring Komunikasi

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Renkon 5.0-BNPPB dan Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD.2024)

4.5. INFORMASI

Informasi di peroleh dari berbagai sumber seperti laporan dari relawan, aparat desa, kecamatan, serta melalui laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Seluruh informasi dikelola oleh Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas. Informasi terkait seluruh kegiatan penanganan hanya dikeluarkan oleh Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan operasi yang terlibat dalam struktur komando. Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh meliputi pengolahan data dan validasi informasi, serta system aplikasi yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Banyumas Disusun Untuk Memberikan Informasi Yang Lebih Detil Terkait Dengan Gambaran Arah Kebijakan Dan Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Di Kabupaten Banyumas. Dokumen Rencana Penanggulanga Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Banyumas Memuat Gambaran Tentang Profil Kawasan, Risiko Bencana, Prioritas Ancaman Yang Harus Segera Ditangani, Pemetaan Sumber Daya Manusia Yang Ada, Penetapan Kebijakan Dan Strategi, Serta Dasar Struktur Organisasi Penanggulangan Bencana (SKPDB), Perencanaan Dukungan Anggaran, juga Mekanisme Pengendalian.

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Banyumas Dilakukan Secara Partisipatif Melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Dengan Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan Penanggulangan Kedaruratan Bencana Di Kabupaten Banyumas. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulanga Kedaruratan Bencana (RPKB) Dilakukan Dengan Melakukan Pemetaan Peran, Fungsi, Dan Tugas Dari Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPBD) Sesuai Dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Mengidentifikasi Bahwa Penaggulangan Bencana Dilaksanakan Secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi, Terkomunikasi, Dan Dilaksanakan Secara Menyeluruh Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat Dari Bahaya, Risiko, Dan Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Bencana.

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Disusun Bertujuan Untuk Memperkuat Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Merespon Secara Cepat, Tepat, Dan Efektif Terhadap Keadaan Darurat Yang Ditimbulkan Oleh Ancaman Bencana Hidrometeorologi Yang Bervariasi Melalui Suatu Kerangka Kerja Pemerintah Daerah, Peran Phentahelix, Instansi Vertikal Dan Pemangku Kepentingan Keadaan Darurat.

Oleh Karena Itu, Diperlukan Perencanaan Penanganan Kedaruratan Yang Lebih Operasional Dan Rinci, juga Spesifik Berdasarkan Jenis Risiko Maupun Ancaman Bencana. Dokumen Rencana Penanggulanga Kedaruratan (RPKB) Ini Selanjutnya Akan Digunakan Dalam Penyusunan Rencana Kontingensi Pada Masing Masing Ancaman Bencana (*Single Hazard*).

Peninjauan Ulang Dokumen Rencana Penanggulanga Kedaruratan Bencana (RPKB) Wajib Dilakukan Minimal Setiap 3 (Tiga) Tahun Sekali Atau Berdasarkan Hasil Update Kajian Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana Yang Terus Dinamis, Hal Ini Dimaksudkan Agar Dokumen Tetap Mutakhir Berdasarkan Dengan Perubahan Keadaan Dan Kondisi Yang Terjadi.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO